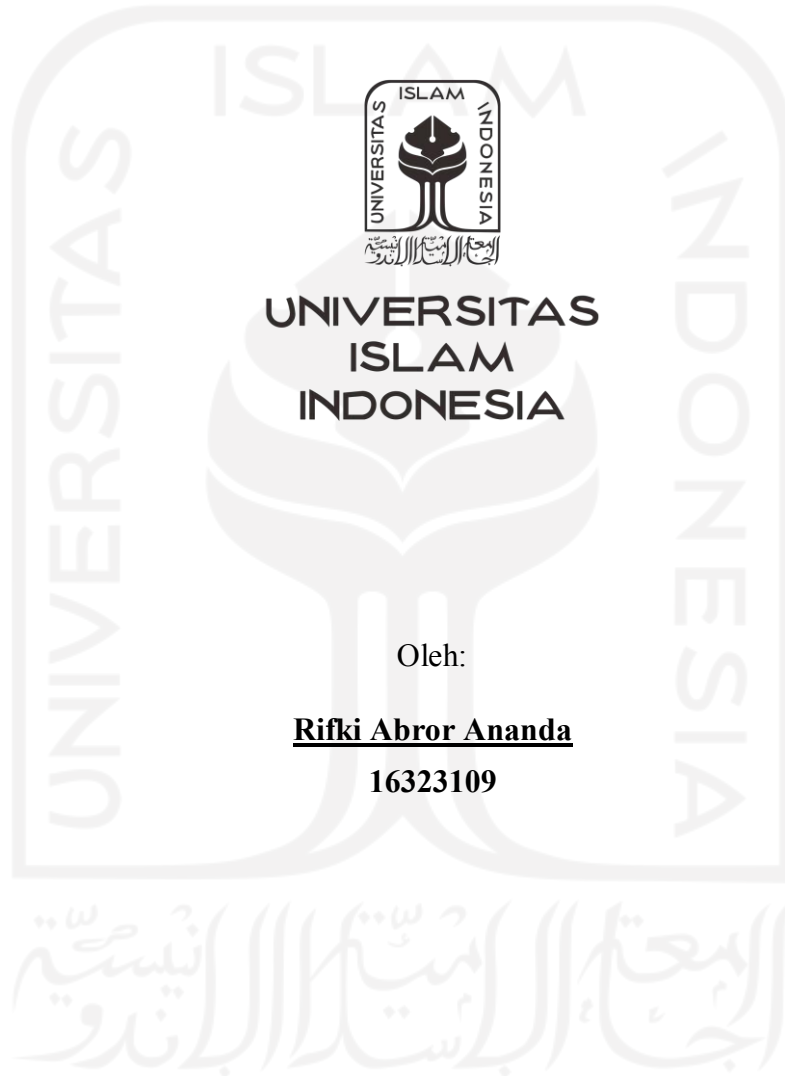


**KEBIJAKAN LUAR NEGERI FIJI TERHADAP TIONGKOK PASCA
KUDETA TAHUN 2006
SKRIPSI**



Oleh:

Rifki Abror Ananda

16323109

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

KEBIJAKAN LUAR NEGERI FIJI TERHADAP TIONGKOK PASCA

KUDETA TAHUN 2006

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

Rifki Abror Ananda

16323109

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN
KEBIJAKAN LUAR NEGERI FIJI TERHADAP TIONGKOK PASCA
KUDETA TAHUN 2006

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

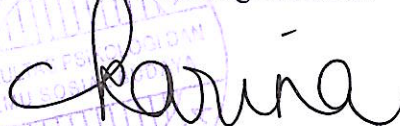
Pada Tanggal

11 Januari 2023

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

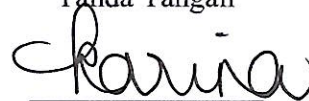


Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 2 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.
- 3 Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.

Tanda Tangan





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertai, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

17 Januari 2023

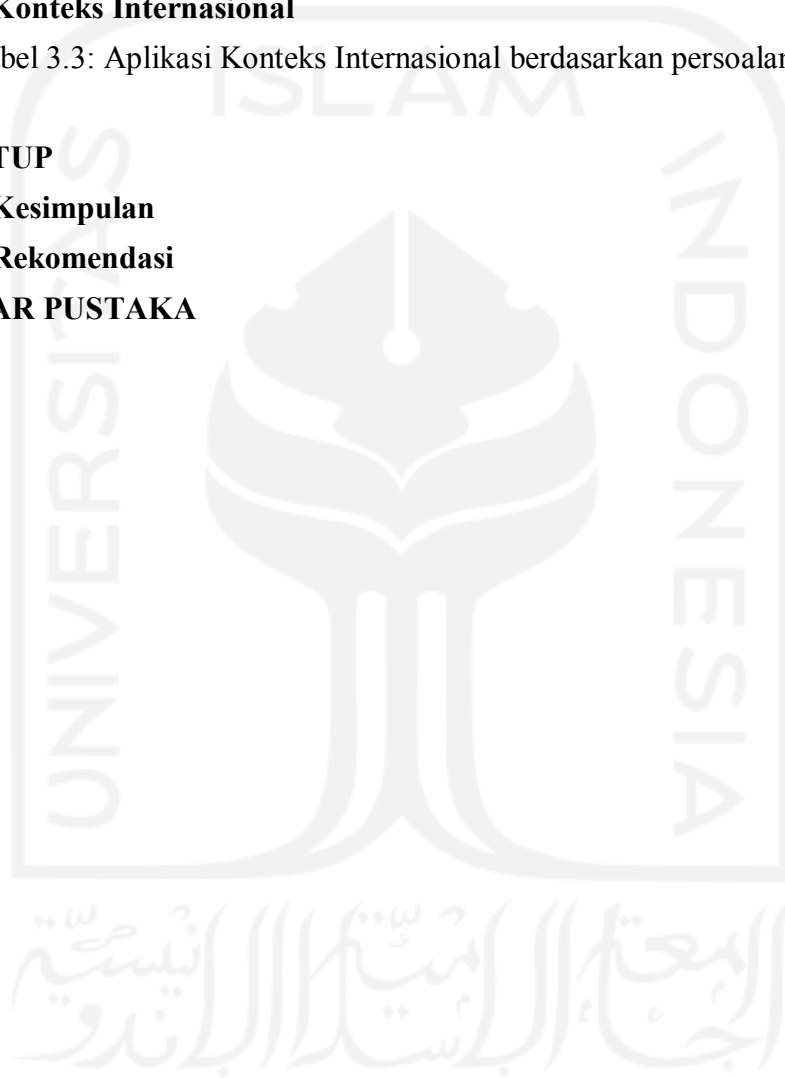


Rifki Abror Ananda

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Cakupan penelitian	4
1.5. Tinjauan Pustaka	5
1.6. Kerangka Pemikiran	7
Gambar 1.1 Proses Pengambilan Keputusan William D. Coplin	8
1.7. Argumen Sementara	10
1.8. Metode Penelitian	11
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	11
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	12
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	12
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	12
1.9. Sistematika Pembahasan	13
BAB 2	14
POLITIK DOMESTIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI FIJI	14
2.1 Fiji Look North Policy	14
2.1 Politik Domestik Fiji	15
<i>2.1.1. Peran Militer dan Bainimarama sebagai Bureaucratic Influencers</i>	16
<i>2.1.2. Soqosoqo Duavata ni Lewenivanua (SDL) dan Fiji Labour Party (FLP) sebagai Partisan Influencers</i>	23
<i>2.1.3. Opini Publik dan Media sebagai Mass influencers</i>	27
Tabel 1.1: Aplikasi Teori Politik Domestik William D. Coplin	31
BAB 3	33
KONDISI EKONOMI DAN MILITER SERTA KONTEKS INTERNASIONAL FIJI PASCA KUDETA MILITER 2006	33
3.1. Kondisi Ekonomi & Militer	33

3.1.1. Kondisi Ekonomi Fiji	33
Grafik 3.1 Bantuan dari Negara Donor, 1996-2010	36
3.1.2. Kondisi Militer Fiji	36
Grafik 3.2 Fiji Military Size 1985-2022	37
Tabel 3.1: Alokasi Pengeluaran <i>Defence Cooperatio Program</i> (DCP) di Pasifik Selatan 2001-2013	38
Tabel 3.2: Aplikasi Teori Kondisi Ekonomi dan Kemampuan Militer	39
3.2. Konteks Internasional	40
Tabel 3.3: Aplikasi Konteks Internasional berdasarkan persoalan Fiji	47
BAB 4	50
PENUTUP	50
4.1. Kesimpulan	50
4.2. Rekomendasi	53
DAFTAR PUSTAKA	54



DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

Gambar 1.1 Proses Pengambilan Keputusan William D. Coplin

Tabel 1.1 Aplikasi Teori Politik Domestik William D. Coplin

Grafik 3.1 Bantuan dari Negara Donor, 1996-2010

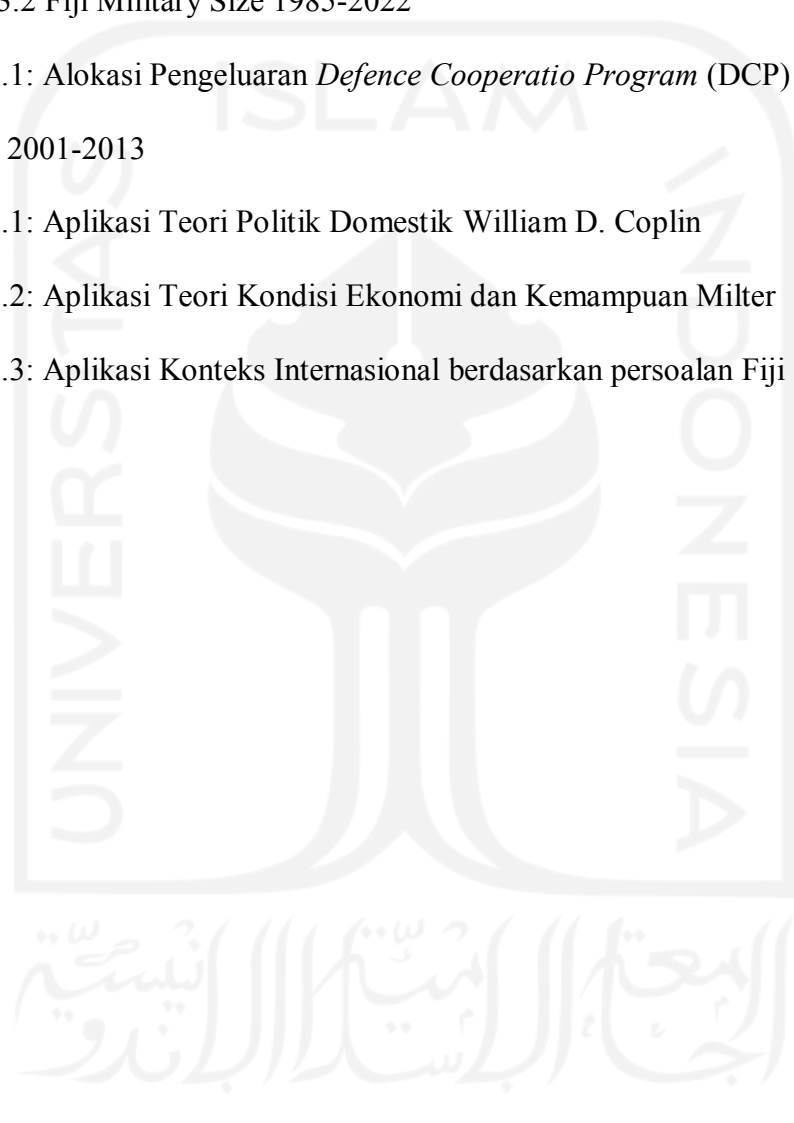
Grafik 3.2 Fiji Military Size 1985-2022

Tabel 3.1: Alokasi Pengeluaran *Defence Cooperatio Program* (DCP) di Pasifik Selatan 2001-2013

Tabel 2.1: Aplikasi Teori Politik Domestik William D. Coplin

Tabel 3.2: Aplikasi Teori Kondisi Ekonomi dan Kemampuan Militer

Tabel 3.3: Aplikasi Konteks Internasional berdasarkan persoalan Fiji



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tanggal 5 Desember 2006, di bawah komando Frank Bainimarama, para prajurit militer Fiji melakukan kudeta terhadap pemerintahan Laisenia Qarase. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Suva, ibukota Fiji, Bainimarama menyatakan bahwa: “militer telah sejak lama mengemukakan keberatan dan kritik terhadap pemerintah, terutama terhadap sejumlah hukum dan kebijakan politik. Kebijakan yang memecah belah persatuan ini dapat berdampak negatif bagi generasi penerus”. Dalam pernyataan yang lain militer mengatakan bahwa “keadaan yang memaksa kami” (Welle, 2006).

Jika melihat pada pernyataan Bainimarama di atas, setidaknya terdapat empat alasan dari dilakukannya kudeta terhadap pemerintahan Qarase. Pertama, diketahui bahwa demi kemenangan SDL (partai Qarase) Kementerian Pertanian Fiji menerapkan kebijakan afirmatif menggunakan dana wajib pajak. Kedua, penolakan terhadap pengangkatan Qoriniasi Bale sebagai Jaksa Agung yang sebelumnya terlibat dalam penyalahgunaan dana perwalian. Ketiga, kontroversi pengurangan hukuman empat pejabat militer yang terlibat dalam pemberontakan November 2000. Permasalahan ini bersifat pribadi bagi Bainimarama dikarenakan ia hampir terbunuh dalam peristiwa pemberontakan tersebut dan dengan menahan empat pejabat terkait, Bainimarama dapat mengalihkan kesalahan seputar penumpasan pemberontakan seperti terbunuhnya tiga tentara pemberontak secara brutal oleh pasukan militer Bainimarama. Alasan terakhir, dari dilakukannya kudeta terhadap Qarase adalah, polemik penerbitan RUU (PRTU dan Qoliqoli) yang banyak dikritik

karena dinilai memiliki intensi untuk melanggengkan praktik korupsi dan politik etnis (Lal, 2009, pp. 23-26).

Pada dasarnya, rentannya terjadi kudeta di Fiji tidak dapat dipisahkan dari adanya permasalahan etnis yang memang lama menggerogoti kehidupan sosial politik masyarakat Fiji. Lahirnya konflik etnis ini dapat dikatakan merupakan dampak langsung dari sejarah kolonialisme. Antara 1879-1916, pemerintah Inggris yang saat itu menjajah India dan Fiji mendatangkan sekitar 60.500 pekerja kontrak India untuk bekerja di perkebunan dan pabrik gula domain Fiji. Komposisi penduduk yang baru terbentuk ini kemudian diatur menggunakan sistem hierarki ras dan perlakuan berbeda berdasarkan etnis. Sistem ini mengakibatkan terbentuknya polarisasi etnis dan menjadi salah satu sebab utama dari terjadinya rentetan kudeta Fiji seperti yang terjadi pada Mei 1987, September 1987, Mei 2000 dan Desember 2006 (Naidu, 2009, pp. 10-11).

Sejak merdeka pada tahun 1970, kebijakan luar negeri Fiji sangat dekat dengan negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Persemakmuran dan Uni Eropa. Selain itu, sebagian besar perdagangan dan ekonomi Fiji juga terkait erat dengan Australia, Selandia Baru dan Uni Eropa. Namun setelah kudeta 2006 mitra utama Fiji ini serentak untuk memberlakukan sanksi ekonomi, perdagangan, embargo senjata dan suspense kerjasama pertahanan. Di saat hubungan Fiji dan mitra tradisionalnya menunjukkan penurunan secara drastis, hubungan Fiji-Tiongkok justru memperlihatkan peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2006, jumlah bantuan luar negeri yang diterima Fiji dari Tiongkok hanya sebesar 36 juta dolar Amerika Serikat. Namun pada 2007, jumlah bantuan luar negeri Tiongkok terhadap Fiji telah meningkat menjadi 251 juta dolar AS (Gaglioti, 2009).

Menurut Bainimarama, “sejak awal pemerintahan saya pada tahun 2006, tingkat bantuan pembangunan Tiongkok ke Fiji telah meningkat pesat. Dalam bentuk proyek hibah langsung jumlahnya bahkan lebih banyak. Selain itu, kami juga tentu saja telah mengambil kesempatan untuk mengakses pinjaman lunak pemerintah Tiongkok melalui Bank Ekspor-Import untuk meningkatkan infrastruktur nasional kami”. Menurut laporan dari *The South Asian Post* dikatakan bahwa, pada tahun 2007, hibah dan bantuan yang dijanjikan oleh Tiongkok adalah sebesar 167 juta dolar yang mana jumlah ini lebih dari setengah bantuan tahunan Tiongkok ke seluruh negara Kepulauan Pasifik (Komai, 2015).

Adanya peningkatan hubungan Fiji-Tiongkok ini juga tidak terlepas dari diberlakukannya kebijakan *look north* yang bertujuan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Tiongkok. Dalam sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Fiji Ratu Inoke Kubuabola bahwa, “Fiji tidak lagi memandang Australia dan Selandia Baru akan tetapi kepada dunia”. Selain itu, dalam kunjungan kenegaraannya ke Beijing pada tahun 2013, Bainimarama juga telah meyakinkan pemerintah Tiongkok bahwa Fiji akan menjadikan Tiongkok sebagai bagian penting dari kebijakan *look north*. Kunjungan Bainimarama ini kemudian dibalas oleh kunjungan kenegaraan Xi Jinping pada tahun 2014. Pada tahun ini juga, hubungan Fiji dan Tiongkok telah meningkat dalam hubungan yang tertinggi dengan diangkat menjadi “Kemitraan Strategis untuk Saling Menghormati dan Kerjasama” (Komai, 2015, p. 113).

Namun demikian, terlepas dari keuntungan bantuan luar negeri yang diterima Fiji, sekarang timbul kekhawatiran akan motif sebenarnya dari bantuan luar negeri Tiongkok terhadap Fiji. Seperti yang dijelaskan oleh Brant P dalam bukunya yang

berjudul *Chinese Aid in South Pacific: Linked to Resources?* bahwa negara-negara pemberi bantuan di belahan utara dunia dan para pendonor bagian selatan semuanya mengejar kepentingan pribadi lepas pantai mereka. Kekhawatiran yang ada kemudian semakin menjadi dengan disalahkannya Tiongkok karena melanggar prinsip bantuan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). (Zhang D. H., 2017, pp. 37-47).

1.2. Rumusan Masalah

Mengapa Fiji memberlakukan *look north* sehingga menjadi lebih dekat dengan Tiongkok Pasca Kudeta 2006?

1.3. Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan luar negeri Fiji pasca kudeta militer 2006.
2. Untuk mengetahui mengapa Fiji menjadikan Tiongkok sebagai mitra strategis.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari perubahan kebijakan luar negeri Fiji pasca kudeta 2006.

1.4. Cakupan penelitian

Penelitian ini mencoba membahas tentang alasan Fiji sebagai negara persemakmuran Inggris memberlakukan *look north* sehingga menjadi lebih dekat dengan Tiongkok Pasca Kudeta militer 2006. Australia dan Selandia Baru yang sebelumnya sering memberikan bantuan luar negeri terhadap Fiji memberikan

sanksi yang berdampak besar pada sosial, ekonomi dan politik Fiji. Melihat kekosongan tersebut, Tiongkok mencoba untuk mengisi posisi yang telah ditinggalkan oleh mitra tradisionalnya. Dalam penelitian ini penulis akan mengambil faktor politik sebagai acuan atas beralihnya arah politik luar negeri Fiji sehingga lebih dekat dengan Tiongkok pasca kudeta 2006. Lingkup waktu yang diambil pada penelitian ini adalah tahun 2006 sampai tahun 2014, dari dilakukannya kudeta pada tahun 2006, sampai diadakannya pemilu demokratis pada tahun 2014. Pada tahun 2014, Fiji telah memberlakukan konstitusi baru dan normalisasi hubungan dengan mitra strategis juga terjadi pada tahun ini. Sehingga, faktor pendorong atau tekanan dari mitra tradisional sudah tidak ada lagi. Selain itu, bagaimana pemberlakuan look north kedepannya apakah dilanjutkan atau tidak juga ditentukan pada tahun ini.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam tulisan Stephen Mc Carthy dijelaskan bahwa sistem demokrasi Fiji diklasifikasikan oleh beberapa orang sebagai contoh rezim hibrid dan juga dilabeli sebagai sistem demokrasi komunal yaitu campuran *westminster* dan adat tradisi. Hal ini membuat perpecahan etnis akan sangat mempengaruhi kualitas demokrasi di Fiji. Meskipun demikian demokrasi Fiji juga pernah disebut-sebut sebagai permata demokrasi di Pasifik selatan. Artikel ini berusaha mengukur kualitas demokrasi Fiji secara keseluruhan. Untuk itu dalam tulisan ini melihat dari berbagai macam faktor seperti supermasi hukum, akuntabilitas pemilu, akuntabilitas antar lembaga dan juga faktor-faktor lainnya (McCharthy, 2011).

Tekanan yang diberikan terhadap Fiji salah satunya yang paling besar datang dari negara tetangga terbesarnya yaitu Australia. Kajian ini dapat ditemukan dalam artikel yang ditulis oleh Dany Rukma dan Saiman Pakpahan. Dalam tulisan tersebut dijelaskan tentang bagaimana upaya Australia untuk memulihkan kembali demokrasi di Fiji. Upaya yang dilakukan Australia tidak hanya melalui internal negara akan tetapi juga dengan melakukan intervensi eksternal berupa menggunakan peran PIF sebagai organisasi regional Pasifik Selatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembekuan keanggotaan Fiji di PIF (Rukma, 2013)

Selanjutnya, artikel yang ditulis oleh Lei Yu dan Sophia Sui dengan judul *China-Pacific Island Countries Strategic Partnership: China's Strategy to Reshape the Regional Order* mengkaji tentang alasan dibalik pendekatan ekonomi dan politik China ke kawasan pasifik selatan. Keterlibatan Tiongkok yang semakin luas di Pasifik Selatan serta upayanya dalam menciptakan kemitraan strategis dengan PIC menunjukkan bahwa Tiongkok bermaksud untuk mengintensifkan kerja sama ekonomi dan politiknya dengan PIC. Dengan meningkatkan kemitraan ekonomi dan strategisnya dengan PIC, Tiongkok berupaya untuk mencapai beberapa tujuan di antaranya adalah mempertahankan pertumbuhan ekonomi negara dengan mendapatkan akses sumber daya dan investasi ke PIC, memenangkan dukungan diplomatik PIC di politik internasional dan global (Lei Yu & Sohpia Sui, 2021).

Dalam artikel yang ditulis oleh Jian Zhang yang berjudul *China's Role in the Pacific Islands Region* juga dijelaskan bahwa kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan yang semakin berpengaruh di Kepulauan Pasifik merupakan sebuah perkembangan yang penting. Namun, seiring dengan meningkatnya pengaruh tersebut, kekhawatiran dan ketakutan akan ambisi Tiongkok dalam mendominasi

kawasan juga meningkat. Pendekatan Tiongkok yang sangat berbeda khususnya dalam program pemberian bantuan yang kontroversial menimbulkan tantangan berbeda bagi pendonor tradisional lainnya, hal tersebut dikhawatirkan akan memicu persaingan strategis yang justru mendestabilisasikan kawasan (Zhang J. , 2013)

Dari keempat literatur di atas belum ada yang menjelaskan tentang arah kebijakan politik luar negeri Fiji pasca kudeta tahun 2006. Pasca kudeta tahun 2006 Fiji mendapatkan tekanan dari dunia internasional, salah satunya adalah dibekukannya Fiji dari keanggotaan PIF. Oleh karenanya penulis akan membahas lebih detail mengenai bagaimana cara Fiji agar tetap bertahan menghadapi tekanan dari luar negeri dengan kondisi krisis politik di domestik.

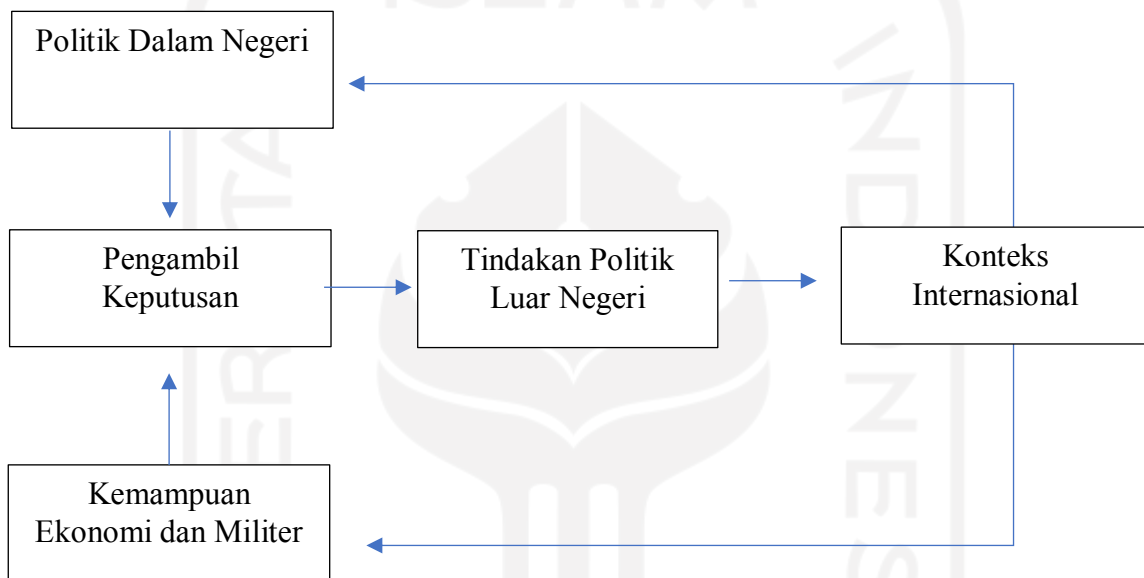
1.6. Kerangka Pemikiran

Decision Making

Untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah, penulis akan menggunakan teori *Decision Making Tehory* yang gagas oleh William D. Coplin. Menurut Coplin, kebijakan luar negeri merupakan sejumlah aktivitas yang terdiri dari kebijakan umum, keputusan-keputusan administratif dan keputusan-keputusan kritis. Lebih lanjut Coplin juga menjelaskan bahwa kebijakan laur negeri suatu negara dihasilkan oleh tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambi keputusan. Ketiga konsiderasi tersebut adalah; *pertama*, kondisi politik dalam negeri, *kedua* kapabilitas ekonomi dan miiter dan *ketiga* adalah konteks iternasional. Selain itu, perlu juga diketahui bahwa setiap konsideran sifatnya hanya mempengaruhi secara parsial dimana setipa konsiderasi bukanlah faktor tunggal

dari terbentuknya kebijakan luar negeri (Coplin, 2003). Berikut ini merupakan penggambaran dari bagan yang diberikan oleh Coplin:

Gambar 1.1 Proses Pengambilan Keputusan William D. Coplin



a. Politik Dalam Negeri

Kondisi dalam negeri negara seperti sistem yang diterapkan, budaya yang terbentuk, atau bahkan aktor-aktor politik dalam negeri dapat mempengaruhi dan memberikan pandangan konseptual bagi pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara. Interaksi antara aktor-aktor politik luar negeri dan pengambilan ini kemudian disebut oleh Coplin sebagai *policy influencers*. Coplin mengategorikan *policy influencers* menjadi empat bagian yaitu, *bureaucratic influencer*, *partisan influencer*, *interest influencer*, dan *mass influencer*. Namun demikian, dalam

analisis kali ini penulis tidak menyertakan faktor *interest influencer* sebagai salah satu subbab analisis dikarenakan setelah kudeta, pemerintah militer muncul sebagai kelompok dominan dalam strata pemerintahan Fiji. Pemerintah militer juga sangat aktif dalam melemahkan kekuatan oposisi maupun lembaga-lembaga lain selain militer sehingga kelompok *interest influencers* sangat sulit untuk berkembang pada periode ini (Coplin, 2003, pp. 73-82)

b. Kemampuan Ekonomi dan Militer

Faktor ekonomi dan militer merupakan dua variabel yang saling berkaitan dan mempengaruhi antara satu sama lain. Ketika kemampuan militer suatu negara meningkat, maka kemampuan ekonominya juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, ketika kemampuan ekonomi meningkat, maka kemampuan militer negara tersebut juga menunjukkan peningkatan. Hal ini pulalah yang menjadi dasar alasan kolonialisme negara-negara Eropa ke negara lainnya. Selain itu, negara yang makmur dari segi ekonomi tentu akan memiliki sektor industri modern yang juga akan digunakan atau menjadi tolak ukur kemampuan negara sehingga mampu memproduksi peralatan militer yang lebih canggih dibandingkan negara-negara lain yang masih mengandalkan sektor pertanian dalam menopang perekonomiannya (Coplin, 2003, pp. 110-124).

Untuk mengukur kapasitas kekuatan militer, Coplin membaginya menjadi 3 kriteria utama, yaitu; kapasitas penggunaan kekuatan militer, tingkat kebergantungan pada sumber-sumber luar negeri dan ketidakstabilan internal dan kemampuan militer. Lebih lanjut, pengambil keputusan juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan militer negaranya dan negara lainnya. Sebab kemampuan ekonomi dan militer dapat mempengaruhi posisi tawar di mata

negara lain dan juga menentukan sikap negara lain terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Ekonomi dan militer merupakan salah satu dari kapabilitas yang dibutuhkan negara untuk menjamin kepentingan nasionalnya (Coplin, 2003, pp. 124-130).

c. Konteks Internasional

Menurut Coplin, terdapat tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap kebijakan luar negeri negara yaitu geografis, ekonomis dan politis. Lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi yang didudukinya, dalam kaitannya dengan negara lain dalam sistem tersebut dan juga hubungan antara ekonomi politik antar negara itu. Singkatnya, konteks internasional mempengaruhi perilaku suatu negara terhadap negara lain. Seperti terciptanya organisasi regional di mana sebab faktor geografis negara-negara saling menjalin hubungan politik dan ekonomi (Coplin, 2003, hal. 165-168).

1.7. Argumen Sementara

Berdasarkan teori *decision making* yang digagas oleh Coplin maka, pengaruh Keputusan Fiji untuk memberlakukan *look north* dan kemudian menjadikan Tiongkok sebagai bagian penting dari pada kebijakan tersebut dapat dilihat melalui tiga faktor utama yaitu, politik domestik, kemampuan ekonomi dan militer serta konteks internasional. Pertama, Politik domestik dipengaruhi oleh empat determinan *influencers* seperti *bureaucratic influencers*, *partisan influencers*, *interest influencers* dan *mass influencers*. Dalam hal ini, penulis menjadikan militer dan Bainimarama sebagai *bureaucratic influencers*, SDL dan FLP sebagai *partisan influencers* dan kontrol media *mass influencers*. Lebih lanjut, penulis juga tidak menyertakan determinan interest influencers dikarenakan praktik otoritarian yang

jalankan oleh pemerintah sementara membuat pergerakan kelompok ini sulit untuk berkembang. Kedua, berdasarkan kemampuan ekonomi dan militer, karena masih besarnya ketergantungan Fiji terhadap mitra tradisional ditambah lagi dengan pemutusan hubungan yang dilakukannya oleh terhadap Fiji membuat pemberlakuan *look north* dan meningkatkan hubungan dengan Tiongkok menjadi salah satu opsi terbaik yang dapat dilakukan oleh pemerintah Fiji saat itu. Terakhir, konteks internasional dapat dilihat melalui bagaimana peningkatan hubungan Fiji-Tiongkok ini difasilitasi oleh kebijakan BRI Tiongkok dan *look north* Fiji. Selain itu, sikap keras mitra tradisional terhadap Fiji juga membuat hubungan Fiji-Tiongkok pun semakin tidak terhindarkan.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur dalam penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari berbagai perilaku seseorang yang diamati. Untuk itu dalam penelitian ini penulis berupaya untuk menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian mengenai keberpihakan Fiji terhadap Tiongkok pasca kudeta militer 2006. Laporan yang ditulis dalam penelitian ini berupa narasi cerita yang menggambarkan secara luas objek yang diamati. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian ini adalah karena akan memudahkan penulis dalam mencari sumber data-data pendukung untuk membuat hasil analisa kebijakan luar negeri Fiji tersebut.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini mengacu kepada Fiji sebagai subjek penelitian yaitu bagaimana arah kebijakan luar negeri Fiji terhadap Tiongkok pasca kudeta militer 2006. Selain dari pada itu penelitian ini juga berusaha untuk mengetahui alasan manuver kebijakan politik luar negeri Fiji terhadap Tiongkok sebagai alternatif partner Fiji.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelusuri dokumen-dokumen dalam buku-buku, jurnal dan berbagai artikel yang memuat tentang informasi yang sesuai dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Dengan metode ini, penulis akan menggunakan data-data dan informasi yang didapatkan untuk menganalisis kebijakan politik luar negeri Fiji terhadap Tiongkok pasca kudeta militer 2006. Selain itu hal yang terpenting adalah peneliti harus memastikan validasi agar dapat dipertanggung jawabkan sebagai sumber penelitian.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses pengumpulan data penulis melakukan beberapa tahapan dimulai dengan melakukan kajian pustaka dengan tujuan untuk memastikan bahwa penelitian yang akan ditulis belum pernah diteliti sebelumnya. Selanjutnya penulis melakukan literature review dengan mengulas serta memilih beberapa data yang berisikan informasi yang berkaitan dan mendukung terhadap materi yang diteliti oleh penulis yang bersumber dari buku, jurnal, artikel dan juga website resmi. Kemudian penulis melakukan beberapa analisa yang diharapkan dapat menjawab rumusan masalah dari penelitian yang ditulis.

1.9. Sistematika Pembahasan

Pada Bab 1 penulis menjelaskan mengenai latar belakang dibuatnya penelitian yang berjudul Perubahan Kebijakan Luar Negeri Fiji terhadap Tiongkok Pasca Kudeta Tahun 2006, rumusan masalah yang akan dijawab dalam pembahasan, tujuan dari penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka yang menjadi referensi dibuatnya penelitian baru yang berbeda, kerangka pemikiran berupa teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian, dan juga argument sementara dari penulis. Pada Bab 2 akan dijelaskan mengenai bagaimana politik domestik mempengaruhi perubahan arah kebijakan luar negeri Fiji, dalam politik domestik tersebut terdapat empat kategori yang mempengaruhi pembuat kebijakan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Fiji yaitu *bureaucratic influencers*, *partisan influencers*, *interest influencers*, dan *mass influencers*. Pada Bab 3 akan dijelaskan mengenai bagaimana kemampuan ekonomi dan militer serta konteks internasional dalam mempengaruhi perubahan arah kebijakan luar negeri Fiji. Bagaimana kondisi kemampuan ekonomi dan militer sebuah negara merupakan salah satu faktor penting bagi pengambil keputusan dalam mempertimbangkan kebijakan luar negeri yang akan diambil. Selain itu, setelah pengambil keputusan melihat kapasitas ekonomi dan militer, dalam membuat kebijakan luar negeri, sebuah negara juga diharuskan untuk melihat bagaimana situasi internasional yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi jika kebijakan luar negeri telah dibentuk. Pada Bab 4 akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari tulisan yang dibuat oleh penulis.

BAB 2

POLITIK DOMESTIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI FIJI

2.1 Fiji Look North Policy

Sebelum membahas bagaimana politik domestik mempengaruhi kebijakan luar negeri Fiji maka terlebih dahulu penulis akan membahas mengenai kebijakan look north yang diberlakukan oleh Fiji. Look north merupakan kebijakan di mana Fiji tidak lagi mengutamakan hubungannya dengan Australia maupun Selandia Baru, melainkan dengan negara-negara yang berada di bagian utara, termasuk Tiongkok. Inisiasi kebijakan look north telah terjadi setelah kudeta tahun 1987, 2000, dan 2006. Karena Fiji terisolasi dari mitra tradisional dan mendapat sanksi ekonomi atau tekanan diplomatik terkait pemulihan pemerintahannya. Untuk menghindari krisis ekonomi, pemerintah mencari investasi dari negara Asia Timur dan Tenggara terutama Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia (Szadziwski, *Converging anticipatory geographies in Oceania: The Belt and Road Initiative and Look North in Fiji*, 2020).

Upaya kebijakan look north ini tidak secara radikal mengubah kebijakan luar negeri atau ikatan ekonomi Fiji karena seiring berjalannya waktu, hubungan dengan mitra tradisionalnya mulai membaik. Namun setelah kudeta tahun 2000, pemerintahan Qarase yang dilantik oleh militer menghidupkan kembali pandangan kebijakan look north dengan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap mitra tradisionalnya yaitu Australia dan Selandia Baru. Upaya tersebut mendorong adanya kunjungan diplomasi yang dilakukan Fiji dan para pemimpin di Asia terutama Tiongkok yang puncaknya terjadi pada April 2006 di mana Perdana

Menteri Tiongkok, Wen Jiabao berkunjung ke Nadi untuk menghadiri forum *China-Pacific Island Economic Development and Cooperation*. Kudeta tahun 2006 membawa Bainimarama ke tampuk kekuasaan. Sanksi ekonomi dan penanggungan diplomatik yang dipimpin oleh mitra tradisional Fiji mendorong pembaruan look north dalam versi terbaru dan menjadi paling berhasil dalam mengorientasikan kembali hubungan Fiji dengan negara-negara Asia khususnya Tiongkok (Szadziwski, *Converging anticipatory geographies in Oceania: The Belt and Road Initiative and Look North in Fiji*, 2020).

2.1 Politik Domestik Fiji

Merujuk pada latar belakang dan landasan teori yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa setelah kudeta 2006, hubungan Fiji-Tiongkok memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Perubahan ini tidak terlepas dari adanya pergantian struktur pemerintahan Fiji yang terjadi akibat kudeta 2006. Oleh karena itu, pada bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana pengaruh politik domestik Fiji terhadap kebijakan luar negeri.

Politik domestik seperti kondisi, perilaku, aktivitas, dan arah politik suatu negara, secara langsung dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Coplin menjelaskan, aktor-aktor politik dalam negeri berupaya untuk mempengaruhi perilaku politik luar negeri. Dalam hal ini, Coplin menyebutnya dengan istilah *policy influencers*. Terdapat empat variabel *influencers* yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi pengaruh politik dalam negeri terhadap kebijakan luar negeri yaitu: *bureaucratic influencers*, *partisan influencers*, *interest influencers*, dan *mass influencers* (Coplin, 2003, pp. 74-82). Namun, pada analisis

ini tidak dibahas mengenai *interest influencers* disebabkan kelompok-kelompok atau Lembaga-lembaga lain selain militer yang menjadi oposisi pemerintah dilemahkan oleh pemerintah. Sehingga kelompok kepentingan tidak punya kekuatan untuk menjadi *influencer* (Coplin, 2003, p. 81).

Dalam konteks Fiji, perubahan struktur yang terjadi akibat pengambilalihan kekuasaan sipil oleh militer, telah membawa babak baru dalam dinamika politik domestik Fiji. Militer mengambil alih pemerintahan dan mengklaim memiliki otoritas eksekutif untuk menjalankan negara. Adanya perubahan pemerintahan Fiji membuat kebijakan luar negeri Fiji juga turut mengalami perubahan (Colvin, 2006). Sejalan dengan ini, Coplin menjelaskan bahwa perbedaan sistem politik suatu negara akan sangat mempengaruhi penyusunan kebijakan luar negeri. Untuk itu, analisis pada sub ini akan berfokus pada rezim militer yang baru terbentuk dan bagaimana para *influencers* dalam mempengaruhi kebijakannya (Coplin, 2003, p. 170).

2.1.1. Peran Militer dan Bainimarama sebagai Bureaucratic Influencers

Bureaucratic Influencers merupakan individu atau organisasi dalam lembaga pemerintah yang membantu para pengambil keputusan dalam membuat kebijakan luar negeri. Coplin juga menjelaskan bahwa, baik di negara demokrasi maupun autokrasi para pemimpin bergantung pada kemauan anggota masyarakatnya untuk memberi dukungan. Sebelum membahas birokrasi yang mempengaruhi kebijakan luar negeri, perlu digaris bawahi bahwa kerap kali orang yang sama dalam birokrasi politik memainkan dua peran sekaligus yaitu yang mempengaruhi kebijakan dan sebagai pengambil keputusan. (Coplin, 2003, p. 74).

Peran dan pengaruh militer dalam sosial politik Fiji selama 27 tahun terakhir sangat menentukan. Tidak hanya mempengaruhi pemerintahan eksekutif berdasarkan struktur pemerintahan, militer Fiji bahkan terlibat dalam empat kali kudeta yang menyebabkan terjadinya pergantian kekuasaan secara paksa di negara tersebut. Sebelum Bainimarama meng kudeta pemerintahan Qarase, Sitiveni Rabuka (panglima militer Fiji) telah lebih dulu melakukan kudeta terhadap Timoci Bavadra. Setelah meng kudeta, Rabuka merubah konstitusi Fiji yang meng akomodir kepentingan hak-hak pribumi. Pada masa ini, jumlah tantara militer Fiji juga berkembang menjadi 6000 personel, dimana tiga kali lipat dari jumlah sebelumnya. Selain itu, Rabuka juga membentuk unit elit khusus yang disebut dengan *Counter Revolutionary Warfare Unit* (CRWU). Unit ini kemudian terlibat dalam kudeta 2000 yang dipimpin oleh George Speight dan upaya pembunuhan terhadap Bainimarama (Ratuva, 2011, p. 106).

Jika melihat dari dinamika kudeta 2000, maka aksi ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh kudeta yang dilakukan oleh *founding father*-nya Sitiveni Rabuka. Kudeta 1987 dan kudeta 2000 sama-sama kudeta yang dilakukan untuk menjamin supremasi para pemimpin politik etnis Fiji. Namun, upaya ini gagal dan baik kudeta ataupun pemberontakan berhasil ditumpas oleh Bainimarama. Pasca kudeta 2000, Bainimarama muncul sebagai sosok tunggal dominan yang mendapatkan dukungan dari para prajurit militer Fiji. Hal ini lah yang kemudian menjadi kendaraan politik Bainimarama sehingga dapat melanggengkan kekuasaannya hingga lebih dari 16 tahun. Sebagaimana Rabuka, Bainimarama pun terus berusaha memperkuat peran militer Fiji dalam struktur politik Fiji yang dilakukannya dengan mencantumkan peran militer sebagai penjaga rakyat Fiji

dalam substansi konstitusi Fiji. Adanya poin ini dapat menjadi tumpuan militer jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kembali campur tangan dengan catatan alasan-alasan kepentingan rakyat dalam politik Fiji (Ratuva, 2011, pp. 106-115).

Pemimpin politik dapat mempengaruhi pemerintahan menjadi agresif ataupun menjalin hubungan damai dengan negara lain. Selain itu, perubahan kebijakan luar negeri juga dapat terwujud apabila terjadi perubahan rezim negara atau ketika negara memutuskan untuk mendorong kebijakan ke arah yang berbeda (Laksono, 2018, pp. 61-62). Secara garis besar, bagaimana pengaruh Bainimarama terhadap politik domestik maupun luar negeri Fiji dapat diidentifikasi melalui dua periode waktu yaitu, Bainimarama sebagai pemimpin kudeta dan kedua setelah menjabat sebagai perdana menteri sementara.

Pertama, Bainimarama sebagai pemimpin kudeta 2006. Dalam sidang umum PBB yang diadakan di New York pada 28 September 2007, Bainimarama mengungkapkan bahwa alasannya melakukan kudeta adalah karena pemilu yang tidak kredibel, salah urus perekonomian negara, maraknya praktik korupsi dan kebijakan perundang-undangan yang cenderung rasis dan memecah belah dalam pemerintahan Laisenia Qarase (Fraenkel, 2009, p. 166). Namun, tindakan ini dianggap oleh para mitra tradisionalnya sebagai upaya yang dapat mengancam nilai-nilai demokrasi Fiji dan Pasifik Selatan dengan kekhawatiran akan terjadinya efek domino di Kawasan tersebut. Australia dan Selandia Baru sepakat untuk memberlakukan sanksi ekonomi dan perdagangan, embargo senjata, menghentikan bantuan pembangunan dan menerapkan larangan perjalanan pada setiap anggota yang terlibat dengan pemerintahan militer Fiji. Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer mengatakan: “Tempat militer adalah di barak, bukan di arena

politik”. Kudeta yang dilakukan oleh Bainimarama ini menjadi awal mula dari memburuknya hubungan Fiji dengan mitra tradisional (Lala, 2009, p. 84).

Selanjutnya, bagaimana pengaruh Bainimarama sebagai perdana menteri dimulai ketika ia memimpin kudeta terhadap Qarase dan mengangkat kembali Ratu Josefa Iloilo sebagai presiden. Selang satu bulan kemudian Josefa Iloilo mengangkat Bainimarama sebagai perdana menteri pada tanggal 5 Januari 2007. Merespon rezim militer yang berdiri di Fiji, komunitas regional Pasifik Selatan maupun mitra dagang internasional mendesak Fiji agar segera melaksanakan pemilu setelah upaya pemulihan pemerintahan Qarase hampir mustahil untuk dilakukan. PIF misalnya, memperingatkan akan menanggihkan keanggotaan Fiji jika tidak menunjukkan kemajuan dalam pemilihan. Australia dan Selandia Baru kukuh tidak akan melonggarkan sanksi sampai Fiji mengembalikan demokrasi sesuai dengan kerangka waktu yang ditentukan. Uni Eropa juga akan menarik bantuannya yang diperkirakan mencapai 400 juta dolar yang sangat dibutuhkan Fiji untuk memulihkan industri gulanya yang sedang terpuruk (Lala, 2009, pp. 67-87).

Sebelumnya, pada 1 Desember 2006 PIF telah mengirimkan delegasi *Eminent Persons Group* (EPG) untuk meninjau dan membantu pemulihan demokrasi Fiji. Pada 15 Desember 2006, putusan kerangka acuan EPG telah selesai dibuat. Dalam salah satu laporan tersebut disebutkan bahwa militer harus mundur ke barak dan segera melaksanakan pemilu antara 18 bulan sampai 2 tahun, atau jika tidak lebih cepat. Dalam hal ini, respon dari Bainimarama terlihat membingungkan dan berubah-ubah. Pertama, pada pertengahan Juni 2007 Bainimarama menolak kerangka waktu yang dipaksakan pihak eksternal. Ia mengatakan, “Fiji dan bukan komunitas internasional yang memutuskan kapan pemilihan diadakan”. Penolakan

ini cukup beralasan karena bertentangan dengan rekomendasi *roadmap* yang telah dibuat oleh pemerintah sementara. Menurut dokumen tersebut, Fiji akan siap untuk melaksanakan pemilu apabila keuangan negara telah stabil, ekonomi dihidupkan kembali, batas-batas pemilihan telah dibuat dan konstitusi baru yang menghapuskan ketentuan praktik politik ras telah selesai. (Lala, 2009, pp. 85-86)

Namun, beberapa hari kemudian Bainimarama menyetujui kerangka waktu EPG dengan syarat masyarakat internasional mau memberikan bantuan kepada Fiji untuk memfasilitasi pemulihan demokrasi. Komitmen ini lalu disambut oleh Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer dengan pemberian bantuan untuk persiapan pemilihan. Kesepakatan yang sama juga terjadi dengan Uni Eropa. Kendati demikian, kekhawatiran komunitas internasional tentang seberapa serius komitmen pemerintah Bainimarama tetap ada meskipun sejumlah progres telah dilakukan seperti penyelesaian sensus penduduk pada tahun 2007 dan juga sedang berjalan pembentukan batas daerah. Hal ini ditunjukkan oleh komentar Alexander Downer, “kita akan menjaga kaki Fiji tetap menyala, kita perlu melihat tolak ukur terpenuhi” (Fraenkel, 2009, p. 169).

Seiring dengan gencarnya kritik yang ditujukan pada pemerintahannya, pada bulan Mei 2007 Bainimarama mengatakan “jika mereka terus melakukan itu, pemilu tidak mungkin dilakukan pada 2009, itu akan terjadi pada tahun 2020”. Lebih lanjut, Bainimarama juga mengatakan pada dasarnya Fiji setuju untuk melakukan pemilu pada tahun 2009, namun pembatasan perjalanan yang diberlakukan Selandia Baru dan Australia sebenarnya mencegah kembalinya demokrasi konstitusional. Atas hal ini pemerintah Selandia Baru menuding Fiji

bermain-main dengan waktu dan memainkan donor bantuan satu sama lain (Fraenkel, 2009, p. 161).

Kekhawatiran mitra utama internasional Fiji ternyata benar adanya di mana pada pertengahan Juli 2008, Bainimarama secara tegas dan terbuka menyatakan bahwa “tidak akan ada pemilihan tahun depan”, ‘kabinet selalu merencanakan untuk mengadakan pemilihan hanya pada tahun 2010” (Fraenkel, 2009, p. 176). Hal ini kemudian berlanjut dengan krisis politik April 2009 menyusul putusan Pengadilan Banding Fiji yang menyatakan bahwa menurut konstitusi pemerintahan sementara telah berkuasa secara tidak sah. Presiden Iloilo (dengan dukungan pemerintah interim) bertindak langsung dengan membatalkan konstitusi, memberhentikan hakim Pengadilan Tinggi, menghapuskan semua posisi konstitusional, membatasi kebebasan media Fiji dan mengangkat kembali Bainimarama sebagai perdana menteri dengan masa jabatan 5 tahun, sehingga pemilu kembali tertunda hingga tahun 2014 (Rukma, 2013, pp. 1844-1845).

Besarnya tekanan dari dunia internasional tidak membuat Fiji merubah keputusannya. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa sanksi yang diterima Fiji tetap berdampak besar terhadap kondisi ekonomi dan politik di negara tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Bainimarama mengeluarkan sejumlah kebijakan luar negeri yang salah satunya disebut sebagai *look north policy*. *Look north policy* atau kebijakan ‘lihat utara’ adalah kebijakan mengedepankan keterbukaan hubungan baru yang dapat terjalin antara Fiji dengan negara lain. Kebijakan ini secara jelas dijabarkan oleh Menteri Luar Negeri Fiji Ratu Inoke Kubuabola dalam pidatonya di pertemuan Dewan Bisnis Australia Fiji pada Juli 2013. Dalam pertemuan tersebut Ratu Inoke mengatakan: “sejak tahun

2009, Fiji telah mengambil ‘jalur berbeda’ dengan menjalin hubungan baru dengan negara-negara yang memahami reformasi Fiji”. “Kami melihat ke utara, ke kekuatan-kekuatan besar Asia, terutama China, India, Indonesia dan baru-baru ini Rusia”. Ia juga sempat mengatakan bahwa “kunci dari strategi ini adalah pendalaman hubungan bilateral dengan Tiongkok”. Pernyataan ini dipertegas kembali oleh Bainimarama dalam kunjungan kenegaraan tahun 2013 di Beijing dimana “Fiji akan menjadikan Tiongkok bagian penting dari kebijakan ‘Lihatlah ke Utara’ (Komai, 2015, p. 113).

Sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Coplin bahwa individu atau organisasi dalam lembaga pemerintahan berupaya untuk mempengaruhi pengambil keputusan dalam membuat kebijakan luar negeri. Selain itu, kerap kali orang yang sama dalam birokrasi pemerintahan mempunyai dua peran sekaligus yaitu yang mempengaruhi kebijakan dan pengambil keputusan. Dalam kasus Fiji, bagaimana pengaruh Bainimarama sebagai *bureaucratic influencers* dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, kudeta yang dilakukan Bainimarama selaku komandan militer Fiji telah membuat perubahan drastis terhadap struktur pemerintahan Fiji. Kudeta ini juga menjadi awal mula dari memburuknya hubungan Fiji dengan mitra tradisionalnya. Kedua, penundaan pemilu yang terus-menerus dilakukan membuat rekonsiliasi hubungan Fiji dengan mitra tradisionalnya sulit untuk dilakukan. Ketiga, pemberlakuan *look north* sebagai strategi kebijakan luar negeri Fiji menjadikan Tiongkok sebagai mitra strategisnya yang baru (Coplin, 2003, p. 82).

2.1.2. *Soqosoqo Duavata ni Lewenivanua (SDL) dan Fiji Labour Party (FLP) sebagai Partisan Influencers*

Partisan Influencers (partai yang mempengaruhi) merupakan kelompok yang menerjemahkan tuntutan-tuntutan politis. *Influencers* ini berupaya mempengaruhi kebijakan dengan cara menekan para penguasa dengan menyediakan personel-personel yang dapat berperan dalam pengambilan keputusan. Selain banyak berfokus pada pembentukan kebijakan dalam negeri, *influencers* ini juga mempengaruhi politik luar negeri terutama apabila kebijakan-kebijakan itu membawa ramifikasi dalam negeri yang kritis (Coplin, 2003, pp. 84-86).

Seven Ratuva mengatakan bahwa konstitusi Fiji mengalokasikan kursi komunal dalam sistem pemilihannya. Berdasarkan hal ini representasi etnis dan budaya politik identitas sangat lumrah terjadi dalam praktik demokrasi Fiji. Berkaitan dengan pengaruh *partisan influencers* pada periode kudeta 2006, penulis menjadikan SDL dan FLP sebagai parameter analisis sebab kedua partai ini paling mendominasi dalam pemilu 2006, dengan SDL 44,59 persen suara dan FLP 39,18 persen suara. SDL dan FLP sama-sama merepresentasikan dua etnis utama Fiji yaitu Taukei dan Indo-Fiji (Ratuva, 2016, pp. 20-28).

A. *Soqosoqo Duavata ni Lewenivanua (SDL)*

SDL merupakan partai yang didirikan oleh Laisenia Qarase pada tahun 2001. Sejak berdiri pada tahun 2001, SDL telah memenangkan pemilu dua kali berturut-turut yaitu tahun 2001 dan 2006. Kemenangan SDL ini tidak terlepas dari banyaknya dukungan yang datang dari bumi putra. Dalam pemilu 2006 disebutkan bahwa, SDL mendapatkan 80% suara iTaukei (nama etnis asli Fiji), dan memenangkan 36 dari 71 kursi. Selain itu, SDL juga banyak mendapatkan

dukungan dari Gereja Metodis yang merupakan organisasi keagamaan terbesar di Fiji, dan *Great Council of Chief* (GCC), sebuah dewan kepala adat yang mempunyai posisi strategis dalam konstitusi Fiji. Namun demikian, pada tahun 2006 pemerintahan SDL dikudeta oleh militer dengan alasan maraknya praktik korupsi, salah urus ekonomi dan kebijakan yang memecah belah (Durutalo A. , 2007, pp. 79-83).

Meskipun telah dikudeta namun, pengaruh SDL tidak surut begitu saja. Salah satunya adalah saat akan terjadinya kudeta, Qarase sempat meminta bantuan intervensi pasukan bersenjata Australia. Namun PM John Howard menolak permintaan ini dengan alasan, “jika tindakan militer diambil sekarang, maka itu akan terkesan menginvasi sebuah negara” (News, 2006). Pada Februari 2007, Qarase juga membawa permasalahan ini ke pengadilan Fiji. Meskipun pada awalnya putusan pengadilan menyatakan bahwa pengangkatan Bainimarama adalah sah, namun kemudian pada April 2009 pengadilan banding memutuskan hal yang berbeda. Sesuai dengan mandat konstitusi pengangkatan Bainimarama sebagai perdana menteri adalah tidak sah. Rezim Bainimarama bereaksi dengan membatalkan konstitusi dan memberhentikan hakim Pengadilan Tinggi Fiji (Rukma, 2013, p. 1844).

Tidak hanya berhenti sampai di situ, ketika pemulihan pemerintahannya hampir mustahil untuk dilakukan, SDL bermanuver dengan mendesak pemerintah interim untuk segera melaksanakan pemilu dan memulihkan demokrasi. Terkait dengan kebijakan luar negeri pemerintahan sementara yang semakin dekat dengan Tiongkok, Peceli Kinivuwei, Direktur Nasional SDL mengungkapkan, “berbisnis dengan China sangat berbeda dengan berbisnis dengan negara lain, mereka adalah

pebisnis yang cerdas dan saat ini mereka sedang mencari mitra dagang”. “Rezim sementara harus sangat pintar (hati-hati) dengan kesepakatan yang akan mereka buat dengan Tiongkok” (Vuruna, 2009).

B. *Fiji Labour Party (FLP)*

Fiji Labor Party pertama kali berdiri pada tahun 1985 yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintahan *Alliance Party* (AP) seperti pembekuan upah, keberpihakan terhadap perusahaan, penghapusan kontrol harga dan subsidi negara, dan lain-lain. Dengan iklim politik Fiji yang berorientasi pada etnis saat itu, FLP muncul sebagai partai pertama yang menjadikan gagasan multi etnis dan serikat pekerja sebagai basis kekuatannya. Dua tahun setelah FLP dibentuk, partai ini berhasil memenangkan pemilu Fiji 1987. Namun di tahun yang sama FLP dikudeta oleh militer yang dipimpin oleh Sitiveni Rabuka. Pada tahun 2000, FLP yang dikepalai oleh Mahendra Chaudhry juga sempat memenangkan pemilu. Namun kembali dikudeta oleh George Speight yang mendapat dukungan dari sejumlah kelompok bersenjata (Durutalo A. L., 2008, pp. 169-173).

Ketika kudeta 2006 terjadi, Presiden partai FLP dalam pidatonya di depan delegasi dewan nasional partai menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan sementara dan perlunya “kudeta pembersihan”. Pernyataan ini kemudian semakin diperjelas dengan bergabungnya Mahendra Chaudhry sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet pemerintah interim, dan dengan posisinya tersebut Chaudhry kerap mengkritik pemerintahan Qarase. Memang, hubungan yang tidak begitu baik antara SDL dan FLP telah mempengaruhi sikap kritis Chaudhry. Akan tetapi, seperti yang

disebutkan oleh Vijay Naidu dalam tulisannya, tindakan ini telah membuat FLP kehilangan landasan moral (Naidu, 2009, pp. 244-247).

Kudeta 2006 banyak dikatakan sebagai kudeta terhadap etnis Fiji. Selain karena dilakukan terhadap pemerintahan yang banyak mendapat dukungan dari etnis Fiji, rezim militer juga terus melemahkan lembaga maupun instansi yang terafiliasi dengan kepentingan etnis Fiji. Bergabungnya FLP yang banyak mendapat dukungan Indo-Fiji dalam kabinet Bainimarama membuat jurang pemisah antara Indo-Fiji dan *Fijian* menjadi semakin lebar. Selain itu, hal ini juga membuat citra FLP tidak lagi sebagai partai kelas pekerja yang multi etnis, melainkan murni partai etnis (Naidu, 2009, p. 248).

Dukungan FLP terhadap pemerintahan militer juga terlihat ketika Australia dan Selandia Baru terus mendesak Fiji untuk melaksanakan pemilu. Presiden FLP Jokapeci Koroi mengungkapkan, “mereka terus mengeksploitasi kami secara komersil, memperlakukan kami sebagai kerajaan kolonial kecil di daerah terpencil mereka”. “Australia dan Selandia Baru terlalu terburu-buru tanpa memberikan waktu bagi Fiji untuk bereformasi sehingga dapat mewujudkan ‘demokrasi yang mengakar’”. Lebih lanjut, Koroi juga mengatakan bahwa PIF tidak lebih dari sekedar instrumen neokolonialisme. FLP telah menjadi korban dari pembelian suara, kecurangan dan campur tangan politik dalam pemilihan. Hal ini tidak dapat dihilangkan kecuali sistemnya dirombak sehingga pemilu bukan lagi hanya sekedar lelucon, katanya (Fraenkel, 2009, p. 171).

Berdasarkan deskripsi diatas dapat dilihat bahwa kedua partai yang mendominasi politik Fiji pada periode kudeta 2006, membawa representasi etnis dalam strategi politik mereka. Hal ini selaras dengan teori Coplin yang

menyebutkan bahwa partai politik berusaha menerjemahkan tuntutan masyarakat menjadi tuntutan-tuntutan politik. Setelah kudeta 2006, kedua partai berusaha mempengaruhi pemerintahan dengan dua cara yang berbeda. SDL berubah menjadi kelompok oposisi yang menentang pemerintahan militer. Usaha ini sempat hampir berhasil dengan keluarnya putusan pengadilan banding yang menyatakan pemerintah militer tidak sah. Meskipun pada akhirnya militer kembali mengambil alih pemerintah dengan menghapus konstitusi.

Berbeda dengan SDL, FLP justru memutuskan untuk bergabung dengan pemerintah militer. Bergabungnya FLP dengan pemerintah militer merupakan salah satu bentuk upayanya untuk mengganti sistem demokrasi komunal Fiji yang selama ini telah merugikan partai tersebut. Sebagai *partisan influencers* yang dijelaskan oleh Coplin, FLP sama-sama berusaha mempengaruhi pemerintah dengan dua cara berbeda, FLP memutuskan bergabung dengan kabinet pemerintahan militer sedangkan SDL bermanuver menjadi salah satu kelompok oposisi pemerintahan (Coplin, 2003, p. 84).

2.1.3. *Opini Publik dan Media sebagai Mass influencers*

Pada teori yang dijelaskan oleh coplin, *mass influencers* adalah iklim opini yang dimiliki oleh populasi yang dipertimbangkan oleh pengambil keputusan. Namun perlu digaris bawahi bahwa, dalam beberapa situasi opini publik terhadap kebijakan tidaklah bersifat otomatis. Para pengambil keputusan terkadang harus secara cermat memupuk iklim opini agar pada kesempatan selanjutnya tidak ada peluang bagi rakyat untuk mengubah kebijakan tersebut. Selain itu terdapat perbedaan antara pemerintahan dengan sistem politik terbuka maupun tertutup. Dalam sistem terbuka meskipun tidak sebebaskan yang diharapkan, namun biasanya

iklim opini lebih terbebas dari manipulasi langsung pengambil keputusan. Berbeda dengan sistem politik terbuka, dalam sistem politik tertutup sikap masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengambil keputusan. Hal ini dilakukan dengan kontrol media masa sehingga manipulasi para pengambil keputusan lebih besar dalam sistem politik tertutup (Coplin, 2003, pp. 88-90).

Setiap gelombang penguasa berusaha untuk mengkonsolidasikan legitimasinya. Terlebih lagi bagi rezim militer yang lahir dari kudeta terhadap pemerintahan sah yang telah dipilih secara demokratis dan melalui proses konstitusional. Sebagaimana kekuatan sosial yang mengklaim kekuasaan secara sepihak, rezim militer Fiji juga terlihat berusaha untuk mendapatkan legitimasi maupun persetujuan publiknya. Permasalahan legitimasi bagi pemerintah Bainimarama tidak hanya berasal dari internal saja, namun juga eksternal. Legitimasi internal merujuk pada negosiasi penerimaan publik terhadap pemerintahan militer, sedangkan masalah legitimasi eksternal terletak pada ancaman maupun tekanan dari pihak eksternal (Jon Fraenkel & Stewarth Firth, 2009, pp. 14-15).

Berkenaan dengan permasalahan internal, pada awal periode terjadinya kudeta, belum terdapat upaya serius dari pemerintah untuk memberangus media ataupun mengontrol arus informasi. Laporan maupun kritik terhadap pemerintah Bainimarama masih bebas untuk tersiar. Mengingat status legalitas pemerintah militer yang masih dipertanyakan, kritik terhadap rezim tentu akan sangat mempengaruhi opini publik dan dapat membahayakan kekuasaannya. Meskipun demikian, terdapat dugaan bahwa sikap Bainimarama ini dikarenakan fatamorgana

media yang bebas juga dapat memberikan suatu tingkat legitimasi terhadap pemerintahannya (Dutt, 2010, p. 82).

Kontrol media baru dilakukan setelah putusan pengadilan banding Fiji menyatakan bahwa pemerintah Bainimarama tidak sah. Peraturan Darurat Publik (PER) diberlakukan untuk memberikan kekuasaan terhadap pemerintah militer agar dapat membatasi hak-hak kebebasan berekspresi dan berbicara. Pemerintah beralasan bahwa media Fiji perlu untuk berpartisipasi dalam visinya untuk menciptakan tatanan baru Fiji yang lebih damai, harmonis dan progresif. Pemerintah komit akan terus memberlakukan PER sampai undang-undang media yang baru dapat diperkenalkan (Dutt, 2010, p. 83).

Terkait dengan legitimasi eksternal, pemerintah telah lebih dulu membela pemerintahannya dari tekanan internasional dengan mengatakan, “demokrasi mungkin baik-baik saja bagi Australia dan Selandia Baru, tetapi tentu saja tidak bagi Fiji”. Bainimarama juga sempat mengatakan bahwa, Fiji dan bukan komunitas internasional yang akan memutuskan kapan pemilihan akan diadakan (Lala, 2009, p. 87). Dalam pidato PBB Oktober 2007, Bainimarma juga mengatakan bahwa kudeta ini merupakan ‘kudeta untuk mengakhiri semua kudeta’. Mengadakan pemilu saat ini sama saja dengan kebohongan karena sistem itu sendiri tidak demokratis. Meskipun tekanan masih masif dilakukan, namun beberapa bantuan internasional berhasil dikeluarkan untuk memulihkan demokrasi Fiji (Fraenkel, 2009, pp. 157-173).

Terkait dengan opini publik yang menyangkut kedekatan hubungan Fiji - Tiongkok, pemerintah beberapa kali menyatakan akan baiknya bermitra dengan Tiongkok. Pernyataan ini sampai pada kesimpulan bahwa, pendekatan yang

dilakukan oleh Tiongkok lebih konstruktif bagi Fiji dibandingkan pendekatan Australia yang cenderung menghukum. Dukungan Tiongkok ini pun dilakukan tidak hanya berdasarkan dukungan-dukungan politik saja namun juga pembangunan infrastruktur untuk masyarakat Fiji. Hal ini dinyatakan langsung oleh Menteri Luar Negeri Fiji Ratu Inoke Kubuabola bahwa Fiji tidak lagi memandang Australia dan Selandia Baru, tetapi kepada dunia. “Kami melihat ke utara, ke kekuatan-kekuatan besar Asia, terutama China, India, Indonesia dan baru-baru ini Rusia”. Kunci keberhasilan dari strategi ini adalah dengan meningkatkan dan memperdalam hubungan dengan Tiongkok. Sejak 2009, Bainimarama telah meyakinkan pemerintah Tiongkok bahwa Fiji akan menjadikan Tiongkok sebagai bagian penting dari kebijakan ‘Lihatlah ke Utara’. Bainimarama juga mengatakan “pihak berwenang China sangat simpatik dan memahami apa yang terjadi di sini-fakta bahwa kami perlu melakukan berbagai hal dengan cara kami sendiri” (Komai, 2015, pp. 112-113).

Berdasarkan deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan sistem pemerintahan yang terjadi di Fiji telah memainkan peranan besar dalam membentuk iklim opini Fiji. Setelah militer mengambil alih pemerintahan, media massa cenderung mendapatkan manipulasi dari pemerintah militer. Hal ini selaras dengan teori Coplin yang menerangkan bahwa terdapat perbedaan antara sistem politik terbuka dan tertutup dalam membentuk opini publik. Pemerintah juga terlihat terus mengulang-ulang argumentasinya tentang pentingnya pengambilalihan yang dilakukannya untuk mendapatkan simpati publik. Selain itu, ketika dihadapkan pada peningkatan hubungan dengan Tiongkok, secara tidak langsung pemerintah juga memperlihatkan kebijakan luar negeri yang diambil saat ini merupakan

peningkatan dari kebijakan sebelumnya yang hanya berfokus pada Australia dan mitra tradisional lainnya (Coplin, 2003, pp. 88-90).

Dalam pembahasan bab II, penulis menjadikan *Politik Domestik* sebagai acuan analisis pertama dikarenakan besarnya dampak pergantian rezim terhadap sosial politik Fiji. Coplin telah memaparkan bahwa terdapat 4 *influencers* dalam negeri yang berusaha untuk mempengaruhi pengambil keputusan dalam memutuskan kebijakan luar negeri. Namun dalam analisis ini, sesuai dengan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, hanya ada 3 *influencers* yang muncul dalam politik domestik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Fiji.

Tabel 1.1: Aplikasi Teori Politik Domestik William D. Coplin

Variabel	Indikator	Aplikasi Teori
Politik Domestik	<i>Bureaucratic Influencers</i>	Dinamika politik domestik Fiji tidak dapat dipisahkan dari adanya pengaruh kuat militer. Demikian pun dengan fenomena kudeta 2006. Bainimarama yang berhasil mendapatkan dukungan penuh militer berhasil mengambil alih pemerintahan Qarase. Sejak saat itu, kekuasaan Bainimarama ini semakin tidak terbendung. Terkait dengan perubahan kebijakan luar negeri, naiknya Bainimarama sebagai pemerintahan militer membuat mitra tradisionalnya memberikan sanksi terhadap Fiji. Untuk itu, Bainimarama yang saat itu sangat membutuhkan dukungan mempengaruhi Fiji untuk mendapatkan dukungan dari Tiongkok. Dukungan ini tidak hanya diperlukan dalam bentuk dukungan politik saja akan tetapi juga ekonomi dan militer.

	<i>Partisan Influencers</i>	SDL dan FLP merupakan dua partai yang paling dominan mempengaruhi dinamika politik Fiji saat periode kudeta 2006. Sejak terjadinya kudeta ini, FLP bergerak mendukung pemerintah sedangkan SDL bergerak untuk melawan pemerintah. Demikian pun dengan kebijakan luar negeri Fiji. SDL beberapa kali mengkritik rezim Bainimarama karena semakin dekatnya Fiji dengan Tiongkok. Sedangkan FLP terus mendukung pemerintah baik saat menerapkan kebijakan luar negeri <i>look north</i> ataupun melawan tekanan dari mitra tradisional.
	<i>Mass Influencers</i>	Pemerintah Fiji terus mempengaruhi opini publik yang berkembang dalam masyarakat. Adapun pemupukan opini ini dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, kudeta 2006 adalah hal yang memang perlu dilakukan. Kedua, terus mengkritik sanksi mitra tradisional yang alih-alih membangun hubungan konstruktif akan tetapi malah menghukum Fiji atas upaya futuristik yang sedang mereka upayakan. Di sisi lain, Tiongkok justru mengerti akan yang terjadi dan hadir dalam mendukung Fiji.
	<i>Interest Influencers</i>	Tidak memiliki indikator <i>interest influencers</i> , karena pemerintah militer sangat aktif dalam melemahkan kekuatan oposisi maupun lembaga-lembaga lain selain militer sehingga kelompok <i>interest influencers</i> sangat sulit untuk berkembang

جامعة البصرة
الدراسات والبحوث
السياسية

BAB 3

KONDISI EKONOMI DAN MILITER SERTA KONTEKS INTERNASIONAL FIJI PASCA KUDETA MILITER 2006

3.1. Kondisi Ekonomi & Militer

Kemampuan ekonomi dan militer memainkan peran penting bagi pengambil keputusan dalam membuat kebijakan luar negeri. Ia harus menyeimbangkan kemampuan negaranya dengan memahami keterbatasan-keterbatasan yang disebabkan oleh kondisi ekonomi dan militer. Berkenaan dengan kondisi ekonomi negara, Coplin membaginya menjadi dua kriteria sub analisis yaitu, kapasitas produksi barang dan jasa, serta tingkat ketergantungan terhadap perdagangan maupun finansial internasional. Sementara itu, dalam dimensi kemampuan militer Coplin membaginya menjadi tiga aspek analisis yaitu kapasitas penggunaan kekuatan militer, tingkat kebergantungan pada sumber-sumber luar negeri dan ketakstabilan internal dan kemampuan militer (Coplin, 2003, pp. 110-129).

3.1.1. Kondisi Ekonomi Fiji

Perekonomian Fiji termasuk salah satu yang paling berkembang diantara negara-negara kepulauan Pasifik lainnya selain Australia dan Selandia Baru. Negara ini memiliki 330 pulau dengan kekayaan alam seperti hutan, mineral, ikan dan merupakan yang paling maju secara industri dengan sektor jasa dan manufaktur yang substansial (Fijian Economy, n.d.). Namun demikian, Fiji belum benar-benar mengembangkan potensi ekonominya secara maksimal. Gejolak politik yang terjadi secara terus menerus serta guncangan eksternal dan ditambah lagi dengan lambatnya reformasi struktural membuat pertumbuhan ekonomi negara ini

terbilang rendah selama tiga dekade terakhir. Sejak merdeka tahun 1970, pertumbuhan PDB riil rata-rata Fiji hanya berkisar di sekitar 2,8 persen pertahun atau 1,6 persen perkapita (WorldBank, 2017, p. xi).

Sebagaimana negara-negara Kepulauan Pasifik lainnya, Fiji juga termasuk negara paling terpencil di dunia, dengan Selandia Baru berjarak 2000 km, Australia 3000 dan Amerika Serikat 5000 km. Hal ini membuat biaya transportasi menjadi lebih tinggi dan mahal. Masalah lain yang menghambat pertumbuhan ekonomi Fiji adalah wilayahnya yang rawan terjadi bencana alam. Posisi Fiji terletak di sabuk siklon tropis dimana rata-rata satu siklon melewati perairan Fiji setiap tahunnya (WorldBank, 2017, p. xi).

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kudeta ataupun krisis politik yang terjadi di Fiji memberikan dampak besar terhadap penurunan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan tajam pada PDB dan investasi beberapa waktu setelah kudeta. Pada tahun 2007, PDB Fiji menyusut sebanyak 6% dan berimbas pada hilangnya lapangan pekerjaan, menyusutnya cadangan devisa serta tekanan pada nilai tukar. Tingkat inflasi pada 2007 adalah sekitar 3,5% dan meningkat hampir dua kali lipat menjadi 7,5% pada 2008. Pendapatan negara (pendapatan pemerintah) berada di bawah tekanan dengan defisit anggaran sebesar 1,3 persen dari PDB. Akibatnya, pemerintah memutuskan untuk memotong gaji dan menunda kenaikan upah pegawai negeri (Chand, 2009, p. 139).

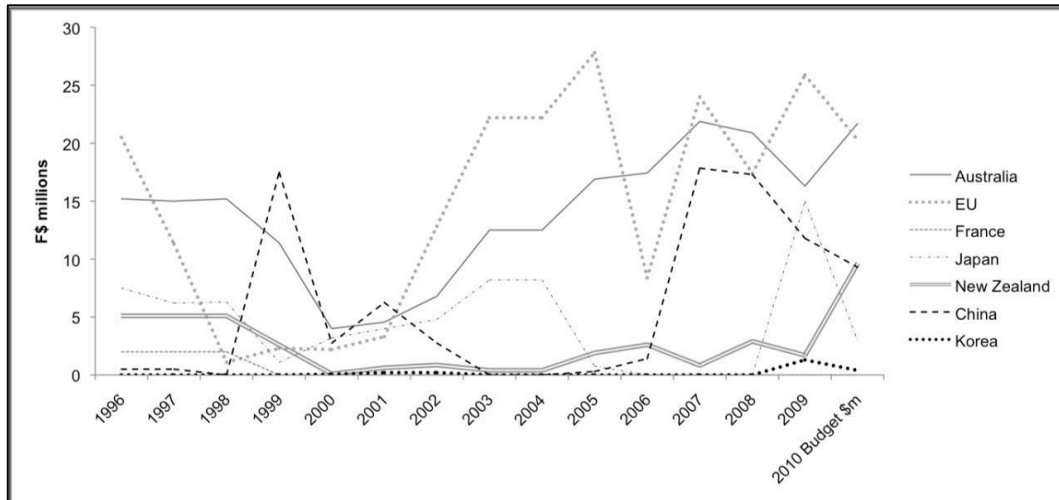
Setiap kali kudeta terjadi, pendonor tradisional Fiji seringkali akan mengurangi atau bahkan menghentikan bantuan yang biasa diberikan kepada Fiji. AS segera menangguhkan bantuan pembangunan yang di dalamnya termasuk hibah militer sekitar US\$500.000 dan US\$268.000 untuk bantuan internasional di bidang

Pendidikan dan pelatihan militer. Uni Eropa memutuskan untuk menunda atau membatalkan bantuannya sebesar F\$400 juta ke Fiji. Namun demikian bantuan untuk kemanusiaan dan dukungan organisasi masyarakat sipil tetap dijalankan. Ancaman terbesar dari adanya penangguhan bantuan Uni Eropa berada pada industri gula Fiji yang sedang krisis dan sangat bergantung pada kebijakan preferensi dagang dengan Uni Eropa (Hanks, 2011, p. 66).

Selain itu, Australia juga memberikan sanksi dengan menanggukkan bantuan yang dapat membuat program rezim militer Fiji menjadi terganggu atau tidak efektif. Sebisa mungkin efek sanksi tidak malah banyak merugikan masyarakat sipil. Berbeda dengan Australia, Selandia Baru justru mengambil pendekatan yang lebih keras dengan menahan semua inisiatif pembangunan baru dan menghentikan beasiswa dan pelatihan untuk pelajar dan pekerja sektor publik. Dari sekitar NZ\$7,8 juta pada tahun 2005-2006, menjadi NZ\$2,5 juta saja pada 2006-2007 (Hanks, 2011, p. 68).

Sementara pendonor tradisional banyak yang mengurangi bantuannya, bantuan dari pendonor non-tradisional justru memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah Tiongkok. Berikut ini merupakan gambaran tentang peningkatan bantuan Tiongkok selama beberapa dekade terakhir.

Grafik 3.1 Bantuan dari Negara Donor, 1996-2010



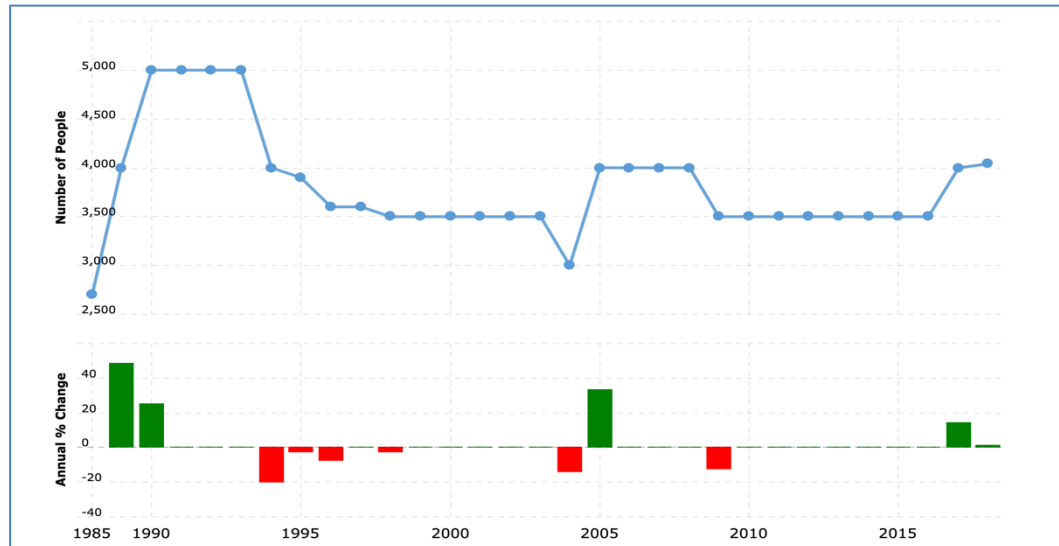
Sumber: Morgan Franciska Hanks, *Aid Sanctions and Civil Society: An Analysis of the Impacts of Targeted Sanctions on Fiji's Non-Government Organisations*, 2011, hal. 52

Berdasarkan tabel di atas juga dapat dilihat bahwa setiap kali kudeta terjadi di Fiji, bantuan yang diberikan Tiongkok terhadap Fiji juga ikut meningkat. Hal ini terjadi pada tahun 1999 dan 2006 (Hanks, 2011, p. 52).

3.1.2. Kondisi Militer Fiji

Pasukan militer Fiji disebut sebagai *Republic of Fiji Military Force* (RFMF). Angkatan bersenjata ini memiliki sekitar 3.500 tentara aktif dan 6000 cadangan. Meskipun RFMF termasuk dalam pasukan militer terkecil di dunia namun, kebanyakan negara-negara Kepulauan Pasifik lainnya justru tidak memiliki angkatan bersenjata sama sekali (Tarte, 2010, p. 82). Berikut ini merupakan perkembangan jumlah pasukan Fiji selama beberapa dekade terakhir:

Grafik 3.2 Fiji Military Size 1985-2022



Sumber: Macrotrends, Fiji Military Size 1985-2022

Sejak tahun 1978, militer Fiji telah aktif dan terlibat dalam banyak misi penjaga perdamaian dunia seperti UNIFIL di Lebanon (1978-2003), UNTAES Slavonia timur (1996-1997), UNIKOM di Irak-Kuwait (1991-1997), dan lain sebagainya. Sementara itu, keterlibatan orang Fiji dalam kerja sama pertahanan dengan mitra tradisionalnya bahkan telah dimulai sejak Perang Dunia Kedua terjadi. Ketika itu, orang Fiji terlibat dalam pertempuran di hutan Papua Nugini dan Solomon di bawah komando AS dan Selandia Baru. Selama pemberontakan komunis di Malaysia pada tahun 1950, pasukan Fiji juga turut dikerahkan bersama pasukan dari Persemakmuran. Pada tahun 1978 Fiji membentuk Angkatan Laut dengan kapal pertama dibeli dari Amerika Serikat. Selanjutnya, kapal-kapal Fiji disediakan oleh Australia dan Israel melalui bantuan militer (Ratuva, 2011, p. 100). Hubungan yang terjalin sejak sebelum kemerdekaan ini terus berlanjut hingga era Fiji saat ini. Bahkan banyak juga yang mengasumsikan bahwa meskipun Fiji tidak

memiliki ikatan aliansi secara resmi, namun hampir dipastikan apabila Fiji diserang, negara-negara ini akan turut membantu (Tarte, 2010, p. 69).

Meskipun Fiji memiliki kapasitas militer yang lebih baik dari negara kepulauan Pasifik lainnya, namun ketergantungan Fiji pada mitra tradisional dalam bidang militer masih sangat besar. Sebagai akibat langsung dari kudeta ini, kerja sama dan bantuan pertahanan Australia, Selandia Baru, Prancis dan Amerika terhenti dan ditanggihkan. Hal ini juga termasuk pertukaran intelejen, pelatihan untuk personel militer, pengawasan udara ZEE Fiji, dukungan teknis untuk operasi tiga kapal patroli yang dipasok Australia, serta latihan kapal patroli regional. Selain itu, Fiji juga dikeluarkan dari dialog keamanan regional yang diadakan dibawah naungan PIF (Tarte, 2010, p. 75). Pendanaan bantuan keamanan Australia turun drastis dari 3.339.812 pada 2006 menjadi nol pada 2011. Sedangkan Amerika Serikat menanggihkan sekitar US\$500.000 hibah militer dan US\$286.000 untuk bantuan internasional (Sam Bateman, 2013, pp. 43-44).

Tabel 3.1: Alokasi Pengeluaran *Defence Cooperatio Program* (DCP) di Pasifik Selatan 2001-2013

Year	Fiji
2006-07	3,229,812
2007-08	554,949
2008-09	315,922
2009-10	21,024
2010-11	0
2011-12	0
2012-13	0
2013-14	0

Sumber: *Terms of Engagement Australia's Regional Defence Diplomacy 2013*, hal 44.

Karena tingkat ketergantungannya yang masih tinggi dalam hal kerja sama dan bantuan militer, tidak lama setelah kudeta, Fiji mulai mencari partner lain untuk mengisi posisi donor tradisionalnya. Dalam hal ini, Tiongkok menawarkan kerja sama selatan-selatan dalam negosiasi terhadap Fiji dan pada 20 Agustus 2007, melalui duta besar Tiongkok untuk Fiji Cai Jibao dikatakan bahwa Tiongkok siap untuk menggelontorkan bantuan sebesar 370 juta dolar AS kepada Fiji. Pada tahun 2013 Kementerian Pertahanan Tiongkok juga berjanji akan meningkatkan bantuan kendaraan, seragam, peralatan alat tulis, serta kesempatan pelatihan bagi tantara Fiji ketika berkunjung ke Suva nanti (Guixia, 2015, pp. 3-5).

Tabel 3.2: Aplikasi Teori Kondisi Ekonomi dan Kemampuan Militer

Variabel	Indikator	Aplikasi Teori
Kondisi Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas produksi barang dan jasa. • Tingkat kebergantungan terhadap perdagangan dan finansial internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiji memiliki kekayaan alam seperti hutan, mineral ikan dan merupakan salah satu negara PICs yang paling maju secara industri manufaktur dan jasa. • Fiji memiliki ketergantungan ekonomi dengan negara mitra tradisional dalam sektor ekonomi diatas. Hal ini membuat sanksi dan isolasi yang diterapkan pasca kudeta berimplikasi besar pada kondisi perekonomian Fiji.

Kemampuan Militer	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas penggunaan kekuatan militer. • Tingkat kebergantungan pada sumber luar negeri. • Ketidakstabilan internal dan kemampuan militer. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disaat mayoritas negara Kepulauan Pasifik hampir tidak memiliki Angkatan militer sama sekali, negara Fiji justru memiliki 9.500 tentara aktif dan cadangan serta dikenal aktif dalam misi perdamaian internasional. • Militer Fiji banyak mendapatkan bantuan dari mitra tradisionalnya baik dalam hal pengadaan alutsista maupun pelatihan prajurit militer. • Persentase perbandingan tentara dan penduduk Fiji yang terlalu besar membuat pengaruh militer terhadap pemerintahan sipil sulit untuk dihindari. Hal ini diperparah dengan situasi dan kondisi politik domestik Fiji yang tidak stabil sehingga memicu campur tangan militer.
-------------------	--	---

Sumber: Diolah dari Pengantar Politik Internasional William D. Coplin

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa meskipun ekonomi dan militer Fiji termasuk yang terbesar dibandingkan dengan negara PICs lainnya namun, ketergantungan Fiji dalam dua bidang ini masihlah cukup besar. Selanjutnya, berkaitan dengan ketidakstabilan politik domestik dan korelasinya dengan kemampuan militer, persentase jumlah prajurit dan penduduk yang tidak begitu jauh membuat pengaruh militer dalam politik domestik Fiji sulit untuk diredam.

3.2. Konteks Internasional

Dalam determinan konteks internasional, Coplin sempat mengutip teori seorang filsuf India, Kautilya. Kautilya mengatakan, negara-negara yang

membentuk sejenis sistem tata surya politik cenderung bergravitasi sebagai sahabat atau bertabrakan sebagai musuh. Di sisi lain, Coplin juga menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor penting dalam memahami konteks internasional yaitu: geografis, ekonomis, dan politis (Coplin, 2003, pp. 165-167). Oleh karena itu, sesuai dengan teori yang dijelaskan William D. Coplin, maka pembahasan kali ini akan mengacu pada tiga determinan tersebut beserta dampaknya terhadap peningkatan hubungan Fiji-Tiongkok.

Determinan pertama yang mempengaruhi negara dalam konteks internasional adalah faktor politis. Menurut Coplin, faktor politis adalah hubungan politik antar negara yang berperan dalam keputusan-keputusan politik luar negeri suatu negara (Coplin, 2003). Oleh sebab itu dalam sub ini akan dibahas mengenai faktor politis apa saja yang mempengaruhi peningkatan hubungan Fiji-Tiongkok. Secara garis besar, terdapat dua faktor utama dari dinamika konteks internasional yang akhirnya mempengaruhi Fiji untuk merubah kebijakan luar negerinya yaitu, adanya faktor pendorong seperti semakin tidak kondusifnya pergerakan Australia di Pasifik Selatan dan faktor penarik seperti upaya Tiongkok yang memang sedang memperluas pengaruhnya di Pasifik Selatan.

Seperti yang diketahui bahwa, hubungan Fiji dan Australia terus memburuk sejak terjadinya kudeta 2006. Selain dari sanksi yang dijatuhkan terhadap Fiji, sulitnya rekonsiliasi hubungan Fiji-Australia ini juga dipengaruhi oleh hubungan Australia dan negara-negara Pasifik Selatan lainnya yang juga mulai tidak kondusif. Pada awal tahun 2000, para pemimpin Australia menggambarkan Pasifik selatan sebagai busur ketidakstabilan. Hal ini lantas mengakomodir intervensi Australia secara lebih koersif dikawasan kawasan tersebut. Selain itu, ketidakselarasan misi

antara Pasifik Selatan secara kolektif terkait perubahan iklim dan posisi Australia sebagai eksportir terbesar batu bara membuat hubungan antar negara ini semakin jauh. Hal ini pula lah yang menginisiasi Fiji untuk membuat organisasi regional tandingan PIF (PIDF) karena organisasi tersebut dirasa tidak efektif untuk membawa kepentingan Pasifik Selatan sebagai negara rawan perubahan iklim sebab ada Australia didalamnya (Tarte, Greg Fry & Sandra, 2015, pp. 5-14)

Lebih lanjut, memburuknya hubungan Australia dan Pasifik Selatan juga dipengaruhi oleh pernyataan-pernyataan para pemimpin Australia yang cenderung “merendahkan” negara-negara Pasifik Selatan. Berikut ini, beberapa pernyataan tersebut: Mantan Menteri Lingkungan Melissa Price dilaporkan berkomentar “untuk Pasifik ini selalu tentang uang tunai. Saya punya buku cek disini berapa banyak yang anda inginkan?”. Selanjutnya, mantan wakil perdana Menteri Michael McCormack juga mengatakan, “saya merasa sedikit kesal kepada orang-orang dinegara itu yang ingin kita menutup sector sumber daya kita “batu bara”. “Mereka akan terus bertahan hidup dengan bantuan bear dari Australia dan banyak dari pekerja mereka yang datang kesini untuk memetic buah kami”. Pernyataan-pernyataan semacam ini bertentangan dengan diplomasi bahaya perubahan iklim yang sedang dikampanyekan negara Pasifik Selatan (Wallis, 2021, pp. 8-12).

Selanjutnya, faktor penarik dari meningkatnya hubungan Fiji dengan Tiongkok adalah karena rezim sementara Fiji memang sangat membutuhkan dukungan dari Tiongkok tidak hanya secara financial, namun juga politik. Dalam salah satu forum PBB misalnya, Tiongkok tidak ragu untuk menolak usulan Australia dan Selandia Baru yang ingin menanggihkan Fiji dari misi penjaga perdamaian. Atau dalam salah satu inisiatif yang dipimpin Fiji untuk mengadakan

engaging with Fiji, Tiongkok juga memberikan dukungan dana agar Fiji dapat melaksanakan acara yang disebut-sebut sebagai salah satu upaya Fiji untuk mengkonsolidasikan dukungan dari negara-negara Kepulauan Pasifik. Selain dari pada itu, ketika sanksi sedang gencar-gencarnya melanda Fiji, Tiongkok justru meningkatkan hubungannya dengan Fiji. Hal ini mampu memberikan dukungan yang signifikan bagi pemerintahan Bainimarama sehingga dapat lolos dari dampak vital jeratan sanksi yang menerpa negaranya. Disisi lain, bagi Tiongkok Fiji memiliki posisi strategis yang terletak ditengah-tengah gugusan pulau negara Kepulauan Pasifik tempat kantor lembaga-lembaga regional seperti PIF dibangun (May, 2011, pp. 1-4).

Kedua, hubungan Fiji-Tiongkok terintegrasi dalam 2 kerangka besar yaitu Fiji *look north policy* dan Tiongkok *Belt and Road Initiative (BRI)* yang digagas Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di Pasifik Selatan. Dalam salah satu pernyataan presiden Fiji Jioji Konrete ia mengatakan bahwa “Fiji berterima kasih kepada Tiongkok karena telah membantu perekonomian Fiji dan menganggap Tiongkok sebagai arah utama dari kebijakan *look north*. Di sisi lain, dalam salah satu artikel yang ditulis oleh Zhang bahwa, Fiji terletak di perpanjangan alami Jalur Sutra Maritim abad 21. Hal ini semakin menambah *bargaining position* Fiji terhadap Tiongkok. Selain itu, hubungan yang terus tumbuh ini juga difasilitasi oleh prinsip non intervensi yang dianut oleh Tiongkok. Sehingga, adanya gejolak politik internal yang dialami Fiji juga tidak akan mempengaruhi perkembangan hubungan kedua negara tersebut (Szadziewski, *Converging Anticipatory Geographies in Oceania: The Belt and Road Initiative and Look North in Fiji*, 2020, pp. 1-7).

Determinan selanjutnya (faktor geografis), merupakan respons pemberian suara di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan keanggotaan bersama dalam organisasi antar pemerintahan (Coplin, 2003, p. 167). Berkenaan dengan ini, setelah negara-negara mitra tradisional memberlakukan isolasi terhadap Fiji, beberapa organisasi internasionalpun mulai melakukan hal yang sama. Tepatnya setelah Fiji kembali menunda pemilu, PIF dan Persemakmuran sepakat untuk membekukan keanggotaan Fiji. Hal ini juga berlaku dengan Uni Eropa yang memutuskan untuk menanggihkan kerja sama dan berencana membatalkan aliran bantuan yang selama ini diterima Fiji (Markovick, 2009, pp. 12-22).

Akibat dari penganguhan ini, Fiji tidak lagi memiliki hak untuk mengikuti sidang forum, berpartisipasi dalam perjanjian perdagangan dan menerima bantuan luar negeri dari tiga organisasi tersebut. Dampak lain yang akan diterima adalah, kerenggangan komunikasi dengan negara-negara anggota organisasi lainnya sehingga dapat menutup dialog inklusif agar Fiji dapat memulihkan keanggotaannya. Selain itu, Fiji juga akan semakin kesulitan untuk memobilisasi legitimasi dan dukungan bagi pemerintahan militernya yang dinilai ilegal (Oley, 2020, p. 92).

Untuk mensiasati hal ini, Fiji mulai mengambil tindakan dengan memperkuat posisi dan membangun pengaruh untuk menjadi kekuatan regional (pemimpin) baru Pasifik. Sejumlah langkah strategis coba dilakukan Fiji seperti menjadi ketua di MSG, memprakarsai pembentukan organisasi regional baru PIDF, ikut secara aktif dalam memperkuat PSIDS sebagai blok khusus Kepulauan Pasifik di PBB, atau menjadi ketua dari G77, yang mana belum pernah dilakukan oleh negara-negara Kepulauan Pasifik lainnya. Selain itu, pergerakan ini juga menjadi

katalisator bagi diplomasi kepulauan Pasifik lainnya. Hal ini terlihat dari pergerakan negara-negara Kepulauan Pasifik lain yang mulai ekspresif dan tegas untuk terlibat dalam mendapatkan kepentingannya baik dalam lingkup regional maupun global yang banyak dikenal sebagai diplomasi baru Kepulauan Pasifik (Tarte, Greg Fry & Sandra, 2015, pp. 5-14).

Lebih lanjut, letak Fiji yang berada di pusat Kawasan Kepulauan Pasifik juga membantu posisi tawar Fiji terhadap negara lain. Dalam artikel yang ditulis oleh Sandra Tarte misalnya, disebutkan bahwa Fiji telah lama mendapatkan tempat khusus dalam kebijakan luar negeri Tiongkok. Letak strategis Fiji yang berada di pusat Kawasan Kepulauan Pasifik dapat menjadi penghubung diplomasi regional dan persimpangan jalur komunikasi (Tarte, 2021, p. 376). Ketika baru saja ditanggihkan dari PIF, Fiji mengadakan pertemuan yang disebut *engaging with Fiji*. Pertemuan ini juga merupakan salah satu cara Fiji untuk mengkonsolidasikan dukungan terhadap negaranya. Agar acara tersebut dapat terlaksana, Tiongkok menyumbangkan sejumlah bantuan dana terhadap Fiji (May, 2011, pp. 1-4). Selain itu, dalam salah satu sidang PBB terkait rencana penanggulangan Fiji dari tugas penjaga perdamaian yang diajukan Australia dan Selandia Baru, secara mengejutkan Tiongkok juga menentang hal tersebut (Tarte, 2021, p. 384).

Determinan ketiga dalam sub konteks internasional yaitu faktor ekonomis. Coplin menjelaskan, faktor ekonomis dapat dilihat dari pertukaran barang dan jasa serta arus modal yang membuat negara-negara tertentu bergantung pada negara lainnya. Biasanya, negara dengan pendapat menengah ke bawah cenderung memiliki ketergantungan pada negara maju dalam bidang perdagangan dan bantuan luar negeri. Berkenaan dengan ini, perekonomian Fiji ditopang oleh tiga sektor

utama yaitu, pertanian 16,6%, industry 22,4% dan jasa 61%. Dengan demikian, pembahasan faktor ekonomis akan dilihat melalui pertukaran barang, jasa serta tingkat ketergantungan Fiji berdasarkan ketiga sektor ekonomi tersebut.

Sektor jasa Fiji didukung kuat oleh sektor pariwisata yang menghasilkan lebih dari F\$500 juta valuta asing atau setara dengan lebih dari 20% PDB Fiji (Narayan, 2004, p. 420). Sektor ini menghasilkan sekitar 40.000 lapangan pekerjaan dan menjadi sektor kunci kebangkitan ekonomi Fiji. Namun demikian, ketergantungan Fiji pada sektor pariwisata membuatnya rentan terhadap guncangan dari pihak eksternal (Fund, 2014, p. 4). Sebagian besar wisatawan berasal dari negara-negara mitra tradisional Fiji yang mana Australia menjadi penyumbang terbesar dengan 45% jumlah pengunjung, disusul dengan Selandia Baru, Amerika Serikat, Inggris dan Kepulauan Pasifik (AsianDevelopmentBank, 2014). Ketika kudeta terjadi, negara-negara ini memberlakukan pembatasan perjalanan terhadap Fiji sehingga pemulihan pariwisata bergantung pada pencabutan sanksi dan normalisasi hubungan diplomatik dengan negara-negara tersebut (Chand, 2009, p. 140).

Sedangkan sektor industri sebagian besar ditopang oleh sektor manufaktur yang terdiri dari gula, tekstil, garmen, tembakau, pengolahan makanan, minuman serta industri berbasis kayu. Sektor ini mempekerjakan sekitar 26.000 tenaga kerja dan merupakan salah satu sektor yang berkembang di Fiji (AsianDevelopmentBank, 2014). Meskipun Fiji memiliki struktur produksi yang lebih beragam dibandingkan negara Pulau Pasifik lainnya namun, keberlangsungan ekonominya masih sangat bergantung pada gula dan pariwisata (Fund, 2014, p. 4). Disisi lain, sektor gula Fiji juga bergantung pada akses pferensial dari Uni Eropa

dibawah perjanjian *The Sugar Protocol* sedangkan industri garmen didorong oleh perjanjian perdagangan dengan Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat (WorldBank, 2017, p. 13).

Terakhir, sektor pertanian Fiji memainkan peran krusial dalam ekonomi mengingat kapasitasnya untuk berkontribusi pada prioritas kebijakan utama seperti ketahanan pangan, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi (Japan, 2014). Akan tetapi, karena banyaknya petani subsisten, sektor yang memperkerjakan hampir 70% dari populasi ini hanya berkontribusi 9% dari PDB negara (Rabobank, 2011, p. 2). Ekspor pertanian Fiji masih didominasi oleh sektor gula namun, pada 2008 akses prefrensi UE terhadap gula Fiji akan dihapuskan karena adanya protes dari WTO. Untuk mensiasati hal ini, UE mengalokasikan bantuan dengan total F\$350 juta sebagai bentuk kompensasi atas hilangnya prefrensi gula. Namun, bantuan ini ditangguhkan karena adanya kudeta dan baru dapat dicairkan apabila pemilu kembali dilaksanakan (Adjaye, 2010, p. 54).

Tabel 3.3: Aplikasi Konteks Internasional berdasarkan persoalan Fiji

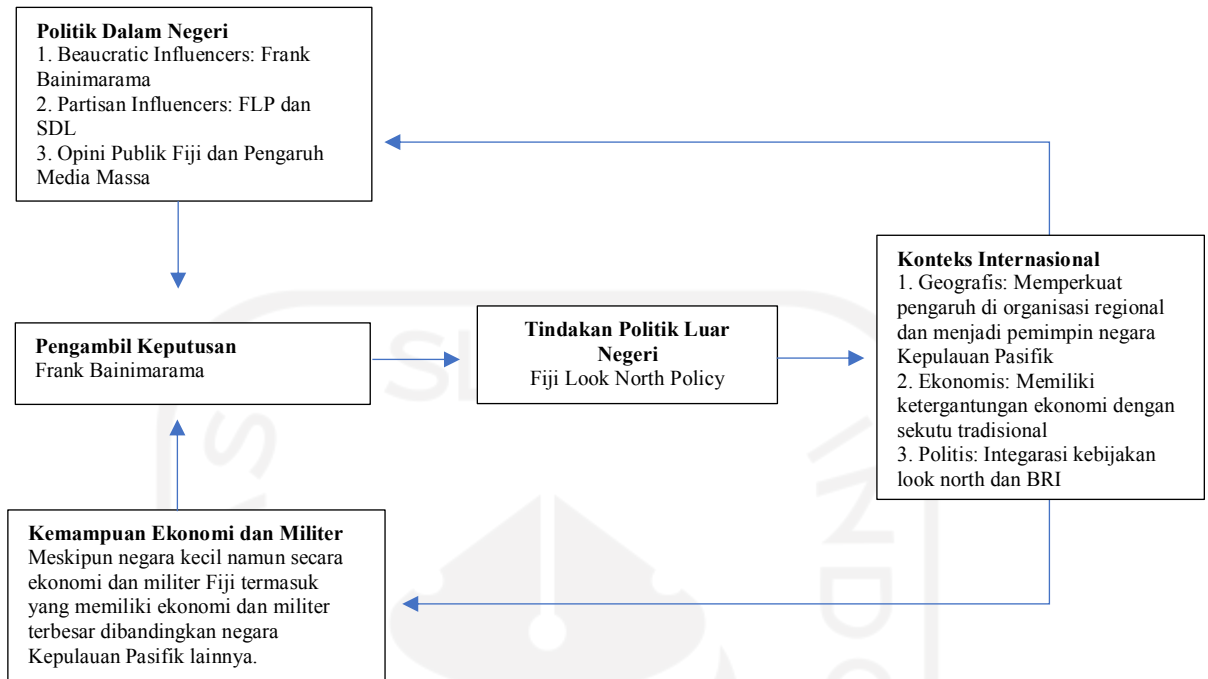
Variabel	Indikator	Aplikasi Teori
Konteks Internasional	Politis	Bagaimana dinamika konteks internasional dalam mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Fiji. Dalam hal ini hubungan Australia dan Pasifik Selatan yang semakin tidak kondusif membuat Fiji mengalihkan kebijakan luar negerinya ke Tiongkok. Selain itu, peningkatan hubungan Fiji-Tiongkok juga difasilitasi oleh ekspansi Tiongkok yang memang sedang membangun pengaruhnya di kawasan Pasifik Selatan.

	Ekonomis	Perekonomian Fiji ditopang oleh tiga sektor utama yaitu, pertanian 16,6%, Industri 22,4% dan jasa 61%. Ketiga sektor ini masih bergantung dengan mitra tradisional. Sektor pariwisata (jasa) bergantung pada pembekuan hubungan diplomatik yang dilakukan Australia, sedangkan sektor industri (gula) bergantung pada akses preferensi yang dilakukan dengan Uni Eropa.
	Geografis	Bagaimana upaya Fiji dalam membangun pengaruh baik secara regional maupun internasional. Selain itu, Fiji juga mulai membangun citra sebagai pemimpin negara PICs yang dimanifestasikan dengan membentuk organisasi regional tandingan PIDF, aktif memperkuat PSIDS sebagai blok khusus PICs di PBB dan menjadi ketua G77. Pergerakan Fiji ini juga menjadi katalisator bagi pergerakan negara-negara PICs untuk lebih aktif dalam mendapatkan hak dan kepentingannya.

Sumber: Diolah dari Pengantar Politik Internasional William D. Coplin

Berdasar pada tabel diatas, faktor geografis Fiji dapat dilihat dari bagaimana usaha Fiji dalam membangun pengaruh baik dalam tingkat regional maupun internasional. Hal ini menjadi penting bagi Fiji karena dapat meningkatkan posisi Fiji yang terancam akibat isolasi dan sanksi internasional. Faktor ekonomis memperlihatkan masih besarnya ketergantungan Fiji dengan mitra tradisionalnya. Sedangkan faktor politis memperlihatkan bahwa dengan meningkatkan hubungan dengan Tiongkok maka Fiji akan mendapatkan dukungan secara politik serta keuntungan-keuntungan lainnya.

Proses Pengambilan Keputusan William D. Coplin



Sumber: Diolah dari Pengantar Politik Internasional William D. Coplin

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Manuver signifikan yang dilakukan Fiji dalam politik luar negeri tidak dapat dipisahkan dari terjadinya kudeta militer 2006. Jika merujuk pada teori yang kemukakan oleh Coplin maka perubahan arah kebijakan luar negeri Fiji ini dapat dilihat melalui tiga faktor utama yaitu politik domestik, kondisi ekonomi dan militer serta konteks internasional. Politik domestik terbagi menjadi empat sub teori yaitu *bureaucratic influencer*, *partisan influencer*, *interest influencer* dan *mass influencer*. *Bureaucratic influencers* tertuju pada peran Bainimarama sebagai pemimpin kudeta dan perdana menteri sementara pasca kudeta 2006. Secara garis besar, adanya perubahan rezim dan perbedaan ideologi yang dibawa Bainimarama sangat berpengaruh terhadap tindak tanduk Fiji kedepannya. Pertama, karena Bainimarama merupakan orang yang memimpin kudeta dan didukung kuat oleh militer. Selain itu, setelah ia mengambil alih pemerintahan dunia internasional segera menjatuhkan sanksi dan isolasi terhadap Fiji. Kedua, penundaan pemilu yang dilakukan terus menerus dilakukan oleh rezim Bainimarama membuat rekonsiliasi hubungan dengan mitra tradisonalnya semakin sulit untuk dilakukan. Kedua, kebijakan luar negeri *look north* yang diusung oleh pemerintahannya telah menjadi fasilitator bagi kedekatan Fiji dengan Tiongkok. Ketiga, skema kebijakan luar negeri *look north* dibuat pada masa pemerintahannya. Kebijakan ini kemudian menjadi fasilitator dari peningkatan hubungan Fiji-Tiongkok.

Sedangkan partisan influencer merujuk pada peran SDL dan FLP selaku dua partai dominan yang mempengaruhi perpolitikan Fiji selama periode 2006. SDL menjadi partai pemerintahan yang dikudeta dan berbalik menjadi oposisi utama pemerintahan Bainimarama. Sedangkan FLP (rival SDL) menjadi partai yang bergerak mendukung pemerintahan sementara. Posisi dari kedua partai kemudian mempengaruhi pendapat mereka terhadap hubungan Fiji-Tiongkok. SDL beberapa kali sempat mengungkapkan kekhawatirannya atas peningkatan pengaruh Tiongkok di Fiji. Sedangkan FLP tetap mendukung kebijakan luar negeri pemerintahan sementara tersebut.

Mass influencers, mengacu pada usaha pemerintah sementara untuk tetap mempertahankan dukungan publik terhadap pemerintahannya. Pemerintah menggunakan media massa untuk terus mengungkapkan alasan-alasan dibalik perlunya pengambilalihan dan penundaan pemilu. Ketika media massa dirasa mulai terlalu banyak mengeluarkan kritik, pemerintah menerapkan Peraturan Darurat Publik (PER) untuk membungkam media. Selanjutnya, dalam skripsi ini penulis tidak menyertakan peran *interest influencers* dikarenakan kurangnya pengaruh dari kelompok tersebut akibat dari totaliterianisme yang diterapkan pemerintah sementara.

Determinan kedua dalam teori pengambilan keputusan Coplin adalah kondisi ekonomi dan militer. Dalam hal ini, karena militer dan ekonomi Fiji yang bergantung pada sekutu tradisionalnya, maka mau tidak mau ketika isolasi diberlakukan langkah yang harus diambil Fiji adalah mencari mitra pengganti. PDB Fiji hanya tumbuh sekitar 2,8% pertahun karena gejolak politik yang selalu melanda negaranya. Sementara itu, berdasarkan dimensi kemampuan militer, meskipun Fiji

jauh berada dibawah Australia namun, jika dibandingkan dengan negara Kepulauan Pasifik lainnya, militer Fiji termasuk salah satu yang paling besar. Dalam hal ini, karena kekuatan militernya yang besar dan perbandingan dengan jumlah penduduknya juga tinggi membuat intervensi militer terhadap pemerintahan sipil sulit untuk dihentikan. Aspek lain yang mempengaruhi keterlibatan militer adalah ketidakstabilan kondisi politik domestik Fiji. (Jon Fraenkel & Stewarth Firth, 2009, pp. 14-15)

Determinan konteks internasional terbagi menjadi tiga sub bab yaitu geografis ekonomis dan politis. Berdasarkan aspek geografis dikarenakan kondisi regional Pasifik Selatan yang mengisolasi, Fiji mulai mencari partner kuat baru yang dapat menyaingi hegemoni Australia dan Selandia Baru di Kawasan tersebut. Selain itu, Fiji juga membangun pengaruhnya sendiri agar dapat meningkatkan posisi dan legitimasi Fiji sebagai pemimpin negara Kepulauan Pasifik. Lalu, berdasarkan faktor ekonomis, ekonomi Fiji ditopang oleh tiga sektor utama yaitu; pertanian 16,6%, industri 22,4% dan Jasa 61%. Ketiga sektor ini terkait erat dengan mitra tradisionalnya. Sementara itu, Tiongkok datang dengan solusi-solusi atas menurunnya perekonomian Fiji yang sedang menurun.

Faktor ketiga dalam determinan konteks internasional adalah aspek politis. Dalam konteks Fiji, adanya peningkatan hubungan Fiji-Tiongkok difasilitasi oleh integrasi kerangka kebijakan luar negeri kedua negara tersebut. Fiji dengan *look north policy* dan Tiongkok dengan *Belt Road Initiative*. Selain itu, Tiongkok juga menganut prinsip non-intervensi sehingga apa yang menjadi permasalahan politik domestik Fiji tidak lagi menjadi persoalan untuk kedua negara tersebut menjalin kerja sama.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan kondisi sosial-politik domestik yang tidak stabil, ekonomi-militer yang masih bergantung dengan negara mitra dan konteks internasional yang mempengaruhi membuat peningkatan hubungan dengan Tiongkok merupakan salah satu pilihan rasional yang dapat diambil Fiji dalam kondisi saat itu.

4.2. Rekomendasi

Skripsi ini masih memiliki keterbatasan pembahasan dikarenakan cakupan penelitiannya yang spesifik pada bagaimana perubahan kebijakan luar negeri Fiji pasca kudeta 2006. Sedangkan sebagaimana yang diketahui bahwa pemilu telah dilaksanakan di Fiji pada tahun 2014 yang lalu dan dalam pemilu tersebut, Bainimarama kembali terpilih sebagai perdana menteri melalui proses demokrasi dibawah naungan konstitusi Baru Fiji. Disisi lain, rekonsiliasi dengan Australia dan mitra tradisional lainnya pun telah dilakukan. Maka dari itu, sebagai langkah tindak lanjut dalam penelitian ini, penulis memberikan rekomendasi dan saran kepada peneliti lain untuk meneliti tentang bagaimana hubungan Fiji-Tiongkok selanjutnya. Apakah rekonsiliasi hubungan dengan mitra tradisional ini akan kembali mengurangi supremasi Tiongkok di Fiji? atau apakah Fiji akan kembali didominasi oleh hegemoni Australia dan regional power lainnya dalam menjalankan politik luar negerinya? Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pandangan baru tentang bagaimana geopolitik Pasifik Selatan dan bagaimana negara-negara besar mempengaruhi Kawasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Prujean, F. (2011). The 2006 Fiji Coup: Engagement or Exclusion? Contrasting Reactions from New Zealand and the People's Republic. *Thesis*.
- Hamid, Z. (1990). *Politik di Fiji: Suatu Studi Pendahuluan*. Jakarta: Gramedia.
- Oley, G. S. (2020). Pengaruh Look North Policy terhadap Poros Geopolitik Fiji.
- Salem, S. (2020). Chinese Foreign Aid to Fiji: Threat or Opportunity.
- Rukma, D. (2013). Intervensi Australia terhadap Fiji Pasca Kudeta Militer. *Neliti*, -.
- Laksono, D. A. (2018). Pengaruh Idiosinkratik Shinzo Abe terhadap Upaya Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang dari Pasifisme Idealis Menjadi Pasifisme Proaktif. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol 7*, 60 - 61.
- Fraenkel, J. (2009). The Great Roadmap Charade: Electoral Issues in Post-Coup Fiji. *ANU Press*, 156.
- Komai, M. (2015). Fiji Foreign Policy and New Diplomacy. *ANU Press*.
- Coplin, W. D. (2003). *Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- McCharthy, S. (2011). Soldiers, Chiefs and Church, Unstable Democracy in Fiji. *International Political Science Review* .
- Lal, B. V. (2012). Fiji: Fishing in Troubled Waters. *Security Challenges, Vol. 8, No. 4*.
- Greif, S. W. (1975). Political Attitudes of the Overseas Chinese in Fiji. *Asian Survey*.
- Colvin, M. (2006). *Bainimarama Declares Coup*. Australia: ABC News.
- Lala, B. V. (2009). This Proses of Political Readjustman, The Aftermath of the 2006 Fiji Coup. *ANU E Press*, 84.
- Ratuva, S. (2016). Shifting Democracy, Electoral Changes in Fiji. *ANU Press*, 20-28.
- News, A. (2006). *Howard Refuses Fijian Request for Military Intervention*. Australia: ABC News.
- Vuruna, L. (2009). *Be Wary of Chinese, Warns SDL Party*. Fiji: Fiji Sun.
- Durutalo, A. L. (2008). Fiji Party Politic in The Post Independence Period. *ANU Press*, 169-173.
- Durutalo, A. (2007). Defending the inheritance: The SDL and the 2006 Election. *ANU E Press and Asia Pacific Predd*, 79-83.
- Naidu, V. (2009). Heading for The Scrap Heap of History, The Consequences of The Coup for The Fiji Labour Movement. *ANU Press*.
- Dutt, R. R. (2010). The Fiji media decree A push Towards Collaborative Journalism. *PACIFIC JOURNALISM REVIEW 16* , 82.
- Hayward-Jones, J. (2011). Fiji at Home and in the World Public Opinion and Foreign Policy. *Polling Fiji Institut Lowy 2011*, 1-4.
- Salem, S. (2020). Chinese Foreign Aid to Fiji Threat. *China Report 56*, 12-14.

- Tarte, S. (2010). Fiji Islands' Security Challenges and Defense Policy Issues. *NIDS Joint Research Series No.5*, 82.
- Ratuva, S. (2011). The Military Coups in Fiji: Reactive and Transformative Tendencies. *Asian Journal of Political Science*, 100.
- Sam Bateman, A. B. (2013). Strategy Terms of Engagement Australia's Regional Defence Diplomacy. *Australian Strategic Policy Institute*, 43-44.
- Guixia, L. (2015). China's Development Aid to Fiji Motive and Method. *China Symposium*, 3-5.
- Baledrokadroka, J. (2012). The Unintended Consequences of Fiji's International Peacekeeping. *Institute for Regional Security*.
- Fijian Economy*. (n.d.). Retrieved from Fiji High Commission to the United Kingdom: https://www-fijihighcommission-org-uk.translate.google/about_3.html?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=op,sc
- Fijian Economy*. (n.d.). Retrieved from Fiji High Commission to The United Kingdom: http://www.fijihighcommission.org.uk/about_3.html
- WorldBank. (2017). Republic of Fiji. *World Bank Group*, xi.
- Chand, S. (2009). Swim of Sink, The Post Coup Economy in Limbo. *ANU E Press*, 139.
- Hanks, M. F. (2011). Aid, Sanctions and Civil Society: An Analysis of the Impact of Targeted on Fiji's Non-Government Organization. 82.
- McCormack, S. (2006, December). *Fiji: U.S. Measures in Response to Military Coup*. Retrieved from U.S. Department of State: <https://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2006/78042.htm>
- Oley, G. S. (2020). Pengaruh Look North Policy terhadap Poros Geopolitik Fiji. *Geopolitics and International Contemporary Issues in Asia Pacific Beyond*.
(n.d.). *Fiji Suspended From Commonwealth*. BBC News.
- Narayan, P. K. (2004). Economic Impact of Tourism on Fiji's Economy. *Tourism Economics*, 420.
- Fund, I. M. (2014). 2014 Article IV Consultation-Staff Report; Press Release; and Statement by the Executive Director for the Republic of Fiji. *MF Country Report No. 14/321*.
- CIA. (2005, February). *The World Factbook Fiji*. Retrieved from World Factbook Home: https://user-iiasa-ac-at.translate.google/~marek/fbook/04/print/fj.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=op,sc
- Japan, E. o. (2014). *Fiji's Profile*. Retrieved from Sectors Overview: https://fijiembassy-jp.translate.google/profile/economy/sectors-overview/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=op,sc
- Rabobank. (2011). Country Report Fiji. *Rabo Research*.
- Tarte, S. (2010). Fiji's 'Look North' Strategy and the Role of China. *Berghahn Books*, 118.
- Szadziewski, H. (2020). Converging Anticipatory Geographies in Oceania: The Belt and Road Initiative and Look North in Fiji. *Political Geography* 77 (2020) 102119.
- Gaglioti, F. (2009). *Australia Threatens Fiji with Suspension from Pacific Islands Forum*. World Socialist Web Site.

- May, R. (2011). The Melanesian Spearhead Group: Testing Pacific Island Solidarity. *ASPI*, 5.
- Markovick, N. (2009, Agustus). A Timeline of the 2009 Political Crisis in Fiji and Key Regional Reactions. Retrieved from Parliament of Australia: https://www.aph.gov.au/about_parliament/parliamentary_departments/parliamentary_library/pubs/bn/0910/fiji
- Tarte, S. (2021). Building a Strategic Partnership: Fiji-China Relations Since 2008. *ANU Press*.
- Tarte, Greg Fry & Sandra. (2015). The 'New Pacific Diplomacy': An Introduction. *ANU Press*, 12-14.
- AsianDevelopmentBank. (2014). Country Partnership Strategy: Fiji, 2014-2018. 3.
- Welle, D. (2006). *Kudeta Militer di Fiji*. DW.
- Jon Fraenkel & Stewarth Firth. (2009). The Enigmas of Fiji's Good Governance Coup. *ANU Press*, 14-15.
- Adjaye, R. M. (2010). The Implications of European Union Sugar Price Cuts, Economic Partnership Agreement. *Contemporary Economic Policy*.
- Lal, B. V. (2009). Anxiety Uncertainty and Fear in Our Land, Fiji's Road to Military Coup. *ANU E PRESS*, 23-26.
- Woods, B. A. (2008). The Causes of Fiji's 5 December 2006 Coup. *Thesis*, 45-54.
- Zhang, D. H. (2017). China's Diplomacy in the Pacific Interests, Means and Implications. *Security Challenges*, 37-47.
- Prakoso, F. F. (2018). Keberpilhakan Fiji kepada Tiongkok Sebagai Respon atas Pembekuan Keanggotaan Fiji dalam Pacific Islands Forum (2009-2014). *repostory.unair*.
- Lei Yu & Sohpia Sui. (2021). China-Pacific Island Countries Strategic Partnership: China's Strategy to Reshape the Regional Order. *East Asia*, 1-17.
- Zhang, J. (2013). China's Role in the Pacific Islands Region. 43-56.
- Wallis, J. (2021). Contradictions in Australia's Pacific Islands discourse. *Australian Journal of International Affairs*.
- Szadziewski, H. (2020). Converging anticipatory geographies in Oceania: The Belt and Road Initiative and Look North in Fiji. *elsevier*, 4.

